

Tim 14 Reformasi Birokrasi

1. Pelaksanaan RB
2. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas

Tim 11 SAKIP

1. Perjanjian Kinerja BPS: Januari s.d. Desember
2. Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja (SAKIP) BPS Pusat Triwulanan
3. Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja (SAKIP) BPS Daerah Triwulanan
4. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Sekretariat Utama: Desember (n-1) s.d. Januari
5. Laporan Kinerja BPS: Desember (n-1) s.d. Februari
6. Laporan Kinerja BPS Triwulanan
7. Pengembangan Simonev: Januari s.d. Desember

Tim 9 RUP

Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Periode Kegiatan: Desember (n-1) s.d. Desember

Tim 13

1. Workshop Manajemen Perubahan: Februari s.d. April
2. Survei Budaya Organisasi: Februari s.d. April
3. Internalisasi Core Value BerAKHLAK: Februari s.d. September
4. Pembangunan Agen Perubahan: Januari s.d. Desember

2025

LAPORAN KINERJA

BIRO PERENCANAAN

Tim 14 Reformasi Birokrasi

1. Pelaksanaan RB
2. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas

Tim 11 SAKIP

1. Perjanjian Kinerja BPS: Januari s.d. Desember
2. Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja (SAKIP) BPS Pusat Triwulanan
3. Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja (SAKIP) BPS Daerah Triwulanan
4. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Sekretariat Utama: Desember (n-1) s.d. Januari
5. Laporan Kinerja BPS: Desember (n-1) s.d. Februari
6. Laporan Kinerja BPS Triwulanan
7. Pengembangan Simonev: Januari s.d. Desember

Tim 9 RUP

Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Periode Kegiatan: Desember (n-1) s.d. Desember

Tim 13

1. Workshop Manajemen Perubahan: Februari s.d. April
2. Survei Budaya Organisasi: Februari s.d. April
3. Internalisasi Core Value BerAKHLAK: Februari s.d. September
4. Pembangunan Agen Perubahan: Januari s.d. Desember

2025

LAPORAN KINERJA

BIRO PERENCANAAN

Laporan Kinerja Biro Perencanaan 2025

ISSN/ISBN: -

No. Publikasi:

Katalog: 1202155

Ukuran Buku: **21 x 29,7 cm**

Jumlah Halaman: **ix + 86 halaman**

Naskah:

Biro Perencanaan

Penyunting:

Biro Perencanaan

Desain Kover oleh:

Biro Perencanaan

Penerbit:

©**Badan Pusat Statistik**

Pencetak:

Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. Dokumen ini merepresentasikan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan bidang perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan transformasi statistik, khususnya dalam menuntaskan target Rencana Strategis (Renstra).



Biro Perencanaan berkomitmen memastikan seluruh alokasi sumber daya dan kebijakan program terlaksana secara akurat, efisien, dan berorientasi pada hasil. Laporan ini menyajikan informasi komprehensif mengenai realisasi indikator kinerja, analisis pencapaian sasaran, serta berbagai langkah perbaikan yang diimplementasikan sepanjang siklus perencanaan hingga evaluasi program. Pencapaian kinerja yang diraih merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara Biro Perencanaan dengan seluruh unit kerja di lingkungan BPS serta para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, apresiasi disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tata kelola perencanaan yang adaptif dan akuntabel.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi yang konstruktif dan landasan strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan pada masa mendatang. Hal ini penting guna mendukung peran BPS dalam menyediakan data statistik berkualitas bagi pembangunan nasional. Segala masukan dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 19 Januari 2026

Kepala Biro Perencanaan,



M. Nashrul Wajdi

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran.....	vii
Ringkasan Eksekutif	viii
BAB 1. Pendahuluan.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Unit Kerja/Satuan Kerja	4
1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran.....	5
1.4 Potensi dan Permasalahan	7
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	8
BAB 2. Perencanaan Kinerja.....	13
2.1 Visi dan Misi BPS.....	13
2.2 Target Kinerja Biro Perencanaan 2025-2029	17
2.3 Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025	22
2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025.....	23
2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	29
BAB 3. Akuntabilitas Kinerja.....	33
3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Uker/SatkerTahun 2025	33
3.2 Capaian Kinerja Biro Perencanaan Terhadap Target Renstra	46
3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025.....	49
3.4 Prestasi dan Inovasi Unit Kerja/Satuan Kerja	53
3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran	54
BAB 4. Penutup.....	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Rekomendasi Perbaikan Kinerja.....	60
LAMPIRAN.....	63

Daftar Tabel

Tabel 1. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025	viii
Tabel 2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPS.....	17
Tabel 3. Dasar hitung dan alasan penetapan target Renstra Biro Perencanaan tahun 2025-2029	19
Tabel 4. Target Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025.....	22
Tabel 5. Pagu Total dan Pagu yang Dapat Digunakan pada Tahun 2025.....	29
Tabel 6. Predikat PKO.....	34
Tabel 7. Interpretasi Predikat PKO	35
Tabel 8. Capaian Kinerja Biro Perencanaan menurut Sasaran Strategis Tahun 2023-2025 (%)	37
Tabel 9. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja pada Indikator Persentase Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Tepat Waktu.....	38
Tabel 10. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja pada Indikator Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) BPS.....	40
Tabel 11. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja pada Indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	42
Tabel 12. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja pada Indikator Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada NKA.....	44
Tabel 13. Capaian Kinerja terhadap Target Renstra.....	46
Tabel 14. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025	54

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020.....	4
Gambar 2. Proporsi Pegawai menurut Jabatan Fungsional.....	6
Gambar 3. Proporsi Pegawai menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan	6
Gambar 4. Capaian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023 - 2025	33
Gambar 5. Perbandingan Capaian Kinerja Biro Perencanaan.....	35

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025	63
Lampiran 2. Jumlah Pegawai Biro Perencanaan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 ...	68
Lampiran 3. Jumlah Pegawai Biro Perencanaan Menurut Golongan Tahun 2025	68
Lampiran 4. Jumlah Pejabat Fungsional Biro Perencanaan Tahun 2025	68
Lampiran 5. Laporan Hasil Evaluasi SPIP BPS Tahun 2024	69
Lampiran 6. NKA BPS Tahun 2025.....	72
Lampiran 7 Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) BPS Tahun 2025	73
Lampiran 8. Daftar Prestasi/Penghargaan Biro Perencanaan Tahun 2025.....	76
Lampiran 9. Daftar Inovasi Biro Perencanaan Tahun 2025	77
Lampiran 10. Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Biro Perencanaan TA 2025	79
Lampiran 11. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Diterbitkan Biro Perencanaan Tahun 2025.....	80

Ringkasan Eksekutif

Biro Perencanaan, sebagai unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Utama BPS, terus menjalankan mandatnya dalam koordinasi rencana program, anggaran, monitoring evaluasi, serta transformasi statistik. Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, Biro Perencanaan mencatatkan capaian kinerja indikator sebesar 99,97 persen. Capaian ini masih bersifat sementara karena Nilai Maturitas SPIP tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga menggunakan nilai tahun 2024. Hal serupa terjadi pada indikator Nilai Kinerja Anggaran 2025 yang juga merupakan nilai sementara.

Sejalan dengan indikator kinerja tersebut, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Biro Perencanaan untuk tahun 2025 tercatat sebesar 89,98 persen dengan predikat **Baik**. Meskipun bersifat sementara, angka ini mencerminkan konsistensi Biro Perencanaan dalam menjaga kualitas output di tengah pelaksanaan program transformasi statistik. Dari sisi manajerial, pencapaian ini tetap menunjukkan efektivitas kerja yang stabil jika dibandingkan dengan target-target strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis organisasi.

Tabel 1. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak			
Persentase Dokumen/ Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Rata-Rata Capaian			100 Persen
Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran Didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko			
Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) BPS	Sangat Baik	Sangat Baik	100 Persen
Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,70	3,697	99,92 Persen
Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada NKA	Sangat Baik	Sangat Baik	100 Persen
Rata-Rata Capaian			99,96

Dalam aspek pengelolaan keuangan, Biro Perencanaan mengelola anggaran tahun 2025 dengan pagu sebesar Rp 4,25 Miliar. Hingga periode pelaporan ini, realisasi belanja mencapai Rp 3,097 Miliar atau setara dengan 72,87 persen. Rendahnya persentase realisasi dibandingkan capaian kinerja ini mempertegas komitmen Biro Perencanaan dalam melakukan efisiensi anggaran. Upaya penghematan tetap difokuskan pada digitalisasi kegiatan melalui pembinaan dan pelatihan daring, selektivitas perjalanan dinas dan paket meeting, serta langkah praktis penghematan energi dan alat tulis kantor (ATK) untuk memastikan penggunaan APBN yang tepat guna.

Tim 14 Reformasi Birokrasi

1. Pelaksanaan RB
2. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas

TI SAKIP

Perjanjian Kinerja BPS: Januari s.d. Desember
Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja (SAKIP) PS P
Triwulanan
Tim 15
Kele

Tim

Ren
Per

Per
an: E

(UP)
(n-1)

Manajemen Perub

Manajemen Perubahan: Fe
Idaya Organisasi: Februa
asi Core Value BerAKH
gunan Agen Perubah

BIRO PEREN

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran dan tanggung jawab yang strategis dalam penyelenggaraan statistik nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Melalui regulasi tersebut, BPS ditugaskan untuk menyelenggarakan statistik dasar yang menjadi rujukan utama bagi pemerintah dalam proses perencanaan, perumusan, dan evaluasi kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik menegaskan peran BPS dalam melakukan pembinaan statistik kepada seluruh penyelenggara kegiatan statistik, responden, serta pengguna data statistik. Pembinaan ini mencakup upaya peningkatan kualitas, konsistensi, dan keterpaduan penyelenggaraan statistik agar selaras dengan standar dan kaidah statistik nasional. Melalui pelaksanaan fungsi penyediaan data dan pembinaan statistik tersebut, BPS berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif, efisien, dan andal sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan amanat BPS sebagai penyelenggara statistik dasar dan pembina statistik, diperlukan dukungan berupa kinerja kelembagaan yang menjalankan prinsip-prinsip good governance yang merupakan sasaran strategis ketiga dalam Rencana Strategis BPS Tahun 2025-2029. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan kontribusi Biro Perencanaan sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II yang bertanggung jawab terhadap perencanaan program dan penganggaran di BPS.

Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Biro Perencanaan yang merupakan unit kerja eselon II BPS di bawah Sekretariat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring dan evaluasi serta transformasi statistik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, koordinasi dan pelaksanaan penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi, dan pelaksanaan transformasi statistik.

Tugas dan fungsi Biro Perencanaan dilaksanakan melalui Program Dukungan Manajemen (Dukman) dan Kegiatan Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran. Pada tahun 2025, dalam kegiatan ini terdapat 4 Rincian Output, yaitu (1) Laporan Kinerja Satker Eselon I dengan aktivitasnya berupa Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahan (SAKIP), (2) Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan aktivitasnya berupa Penyusunan Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPS TA 2025-2029, (3) Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan aktivitasnya berupa Monitoring dan Evaluasi BPS, dan (4) Layanan Reformasi Kinerja dengan aktivitasnya berupa pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPS, Rapimkap, dan Pelaksanaan BPS Tahun Anggaran 2025.

1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Unit Kerja/Satuan Kerja

Sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Biro Perencanaan adalah sebagai berikut.

a. Tugas

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring dan evaluasi serta transformasi statistik.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- i. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana.
- ii. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan anggaran.
- iii. Monitoring dan Evaluasi.
- iv. Pelaksanaan Transformasi Statistik.

c. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2020, susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020

Jabatan fungsional yang terdapat di Biro Perencanaan terdiri dari:

- i. Fungsional Perencana: Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya;
- ii. Fungsional Analis Anggaran: Ahli Muda dan Ahli Madya
- iii. Fungsional Statistisi: Ahli Pertama dan Ahli Muda
- iv. Fungsional Pranata Komputer: Ahli Pertama
- v. Fungsional Arsiparis: Terampil dan Ahli Pertama

1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

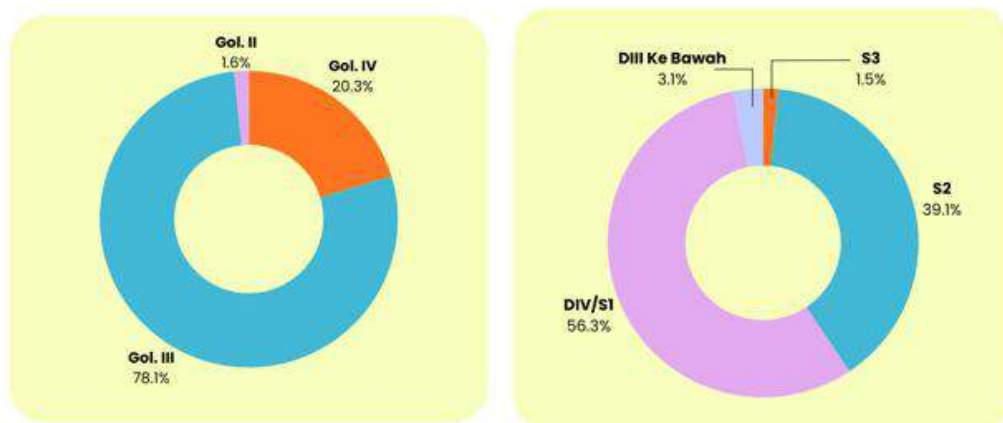
Pada Desember 2025, jumlah pegawai Biro Perencanaan mencapai 64 orang. Ditinjau dari aspek kualitas sumber daya manusia (SDM), hampir 97 persen pegawai adalah mereka yang berpendidikan minimal S1/ sederajat. Dengan kondisi tersebut, Biro Perencanaan memiliki modal sumber daya manusia yang terdidik sebagai faktor pendukung dalam menghadapi peningkatan tuntutan pekerjaan serta dalam mendorong produktivitas melalui inovasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Biro Perencanaan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan kapasitas diri melalui pemberian izin tugas belajar ataupun pelatihan. Tercatat sebanyak empat pegawai Biro Perencanaan telah menyelesaikan pendidikan formal pada jenjang S2 dan S3 pada tahun 2025, sementara satu pegawai masih melanjutkan pendidikan formal pada jenjang S3.



Gambar 2. Proporsi Pegawai menurut Jabatan Fungsional

Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui bahwa dari sisi kompetensi yang dimiliki, sebanyak 91 persen pegawai di Biro Perencanaan adalah mereka yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Mereka menduduki jabatan fungsional yang sesuai keahliannya, yaitu jabatan fungsional perencana, analisis anggaran, statistisi, pranata komputer, dan arsiparis. Jenis jabatan fungsional ini sangat sesuai dengan kebutuhan Biro Perencanaan dalam melakukan tugasnya yang tidak hanya bertanggung jawab dari dalam hal perencanaan kegiatan dan anggaran tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi serta transformasi statistik.



Gambar 3. Proporsi Pegawai menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Gambar 3, dapat diambil informasi bahwa, pegawai Biro Perencanaan didominasi oleh lulusan DIV/S1 dan S2, dengan proporsi terbesar berada pada golongan III dan IV yang mencapai 98 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada tingkat pendidikan dan golongan menengah hingga tinggi, yang secara umum mencerminkan pengalaman dan keahlian yang memadai. Sejalan dengan hal tersebut, jabatan fungsional pegawai didominasi oleh jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda, terutama pada jabatan Statistisi dan Perencana, sehingga menggambarkan struktur SDM yang kuat pada pelaksanaan tugas teknis dan operasional di Biro Perencanaan.

Selain SDM, salah satu faktor yang dapat memperlancar kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi adalah sumber daya berupa dukungan anggaran. Sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-054.01-0/2025, Biro Perencanaan menerima pagu anggaran sekitar Rp 7,69 Miliar pada awal tahun 2025.

Pada tahun 2025, BPS melakukan revisi DIPA sebanyak 13 kali. Pagu akhir Biro Perencanaan sebesar Rp.7,69 miliar dan berkurang menjadi Rp.4,25 miliar. Pengurangan ini diakibatkan adanya kebijakan yang dikeluarkan berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penurunan pagu tersebut mencerminkan penyesuaian alokasi anggaran Biro Perencanaan sebagai tindak lanjut atas kebijakan efisiensi belanja pemerintah, yang menuntut optimalisasi penggunaan anggaran melalui penajaman prioritas kegiatan, pengendalian belanja operasional, serta realokasi anggaran pada program dan kegiatan yang dinilai paling strategis dan berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran kinerja BPS.

1.4 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal Biro Perencanaan, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor internal yang merupakan kekuatan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai visi, misi dan tujuan-tujuan Biro Perencanaan Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Biro Perencanaan memiliki banyak SDM muda dan kreatif dengan latar belakang yang relevan dengan bidang perencanaan dan berpengalaman di satuan kerja (satker) daerah.

2. Biro Perencanaan melakukan pengembangan sistem yang berkelanjutan untuk mendukung tugas dan fungsi berbasis teknologi digital.
3. Biro Perencanaan memiliki sarana prasarana dan infrastruktur yang memadai.
4. Biro Perencanaan memiliki Tim Kerja yang fleksibel namun tetap terukur dalam pembagian tugas untuk mengikuti perkembangan kebutuhan.
5. Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Biro Perencanaan memiliki Kewenangan yang kuat dalam perencanaan strategis, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta transformasi statistik.

Sementara itu, faktor-faktor internal yang berpotensi menghambat dan memerlukan pembenahan serta penguatan secara terarah dan sistematis adalah sebagai berikut:

1. Integrasi koordinasi internal antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja yang masih lemah.
2. Koordinasi dengan unit kerja lain baik di pusat maupun daerah dalam perencanaan kegiatan masih belum optimal.
3. Pemanfaatan data analitik dan teknologi prediktif dalam perencanaan yang masih kurang.
4. Pengelolaan timeline penganggaran belum optimal dalam mengantisipasi hal-hal tertentu.
5. Sistem aplikasi penganggaran belum sepenuhnya terintegrasi.
6. Evaluasi masih berfokus pada output administratif, bukan outcome substantif.
7. Kompetensi SDM di Biro Perencanaan yang memiliki pemahaman mendalam tentang substansi sensus/survei masih kurang.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LAKIN) Biro Perencanaan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan. Pada bab ini disajikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumber daya manusia dan dukungan anggaran; potensi dan permasalahan; dan sistematika penyajian laporan.
2. Bab II Perencanaan Kinerja. Pada bab ini disajikan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Biro Perencanaan; target kinerja Biro Perencanaan; perjanjian kinerja Biro Perencanaan; serta rencana kerja dan anggaran tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan analisis realisasi, capaian kinerja, dan nilai penilaian kinerja organisasi Biro Perencanaan; prestasi dan inovasi; realisasi dan efisiensi anggaran tahun berjalan.
4. Bab IV Penutup. Pada bab ini disajikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja.
5. Lampiran.

Tim 14 Reformasi Birokrasi

1. Pelaksanaan RB
2. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas

11 SAKIP

Perjanjian Kinerja BPS: Januari s.d. Desember
Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja (SAKIP) BPS
Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja (SAKIP) BPS
Laporan Kinerja BPS
Desain Organisasi BPS
5. Laporan Kinerja BPS
6. Laporan Kinerja BPS
7. Pelaporan Kinerja BPS

Perjanjian Kinerja BPS: Januari s.d. Desember
Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja (SAKIP) BPS
Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja (SAKIP) BPS
Laporan Kinerja BPS
Desain Organisasi BPS
5. Laporan Kinerja BPS
6. Laporan Kinerja BPS
7. Pelaporan Kinerja BPS

Tim

Ren
Per

Per
an: E

(UP)
(n-1)

ber

Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan: Fe
Idaya Organisasi: Februa
Esti Core Value BerAKH
gunan Agen Perubahan

BIRO PERENCANAAN

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

BAB 2. Perencanaan Kinerja

2.1 Visi dan Misi BPS

Dalam menghadapi periode pembangunan nasional tahun 2025–2029, BPS menetapkan visi dan misi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai dinamika strategis yang memengaruhi penyediaan statistik resmi di Indonesia. Perumusan visi dan misi ini selaras dengan arah kebijakan dalam RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024–2029 “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Penetapan visi dan misi BPS juga memperhatikan isu-isu strategis kelembagaan yang berkembang, baik pada tingkat nasional maupun global, sehingga BPS mampu memperkuat perannya sebagai penyedia statistik resmi yang relevan, andal, dan dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam rangka upaya tersebut, BPS menetapkan visi dan misi tahun 2025-2029 yaitu:

Visi:

“Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi tersebut menggambarkan komitmen BPS untuk menjaga independensi dalam menghasilkan statistik, mem perkuat kredibilitas lembaga, serta memainkan peran aktif dalam mendukung kebijakan nasional yang berbasis data. Untuk mencapai visi tersebut, BPS menetapkan tiga misi pembangunan yang menjadi arah strategis dalam penyelenggaraan statistik nasional selama periode 2025–2029, yaitu:

Misi 1:

“Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan”

Misi ini merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi BPS. Data statistik yang berkualitas dan insight yang mendalam sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data. Dengan menyediakan data yang berkualitas, BPS memastikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil keputusan yang efektif dan terarah. Hal ini sejalan dengan Visi BPS untuk menjadi lembaga yang tepercaya dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional. Data yang berkualitas juga

menjadi bukti konkret dari independensi BPS karena dihasilkan melalui metodologi yang ilmiah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

Misi 2:

“Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)”

Misi ini bertujuan untuk memperkuat peran BPS sebagai lembaga statistik utama di Indonesia yang mengoordinasikan dan memimpin seluruh kegiatan statistik nasional. Dengan menguatkan kepemimpinan dalam SSN, BPS mengoordinasi agar seluruh data yang dihasilkan oleh berbagai instansi dan lembaga di Indonesia memenuhi standar yang sama, konsisten, dan dapat diintegrasikan. Hal ini mendukung Visi BPS untuk menjadi lembaga yang independen dan tepercaya karena koordinasi yang baik dalam SSN akan menciptakan data yang konsisten dan terstandar, serta memastikan transparansi dalam proses pengumpulan dan penyajian data. Selain itu, kepemimpinan yang kuat dalam SSN juga memperkuat peran aktif BPS dalam mendukung kebijakan berbasis data.

Misi 3:

“Menguatkan Kapasitas Kelembagaan Statistik yang Efektif dan Efisien”

Keberhasilan Misi 1 dan Misi 2 membutuhkan kelembagaan yang tangguh. Untuk itu, BPS berfokus pada pengembangan SDM yang unggul, optimalisasi tata kelola organisasi, dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Melalui efektivitas dan efisiensi, BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS berkomitmen untuk terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyedia statistik resmi yang independen, tepercaya, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan nasional, serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Sebagai perwujudan dari amanat undang-undang statistik dan sekaligus penjabaran Visi dan Misi BPS 2025-2029, ditetapkanlah tiga tujuan strategis yang dirancang secara sinergis untuk saling mendukung dan memastikan keberhasilan seluruh aspek penting operasional lembaga;

TUJUAN 1	Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan
TUJUAN 2	Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien
TUJUAN 3	Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik

Ketiga tujuan ini menguatkan Visi dan Misi BPS sebagai lembaga independen, tepercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data. Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja masing-masing tujuan yang lebih spesifik dan terukur, BPS telah menetapkan tiga sasaran strategis serta indikator kinerja strategis:

Sasaran Strategis 1:

“Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan”

Sasaran strategis pertama BPS berfokus pada peningkatan tingkat pemanfaatan data statistik yang tidak hanya berkualitas dari data statistik, tetapi juga dilengkapi dengan insight atau wawasan yang relevan untuk mendukung proses perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan strategis. Sasaran ini mencerminkan upaya BPS dalam memperkuat posisinya sebagai penyedia utama informasi statistik yang dapat dipercaya dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, digunakan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1 berupa Tingkat Pemanfaatan Data Statistik**. Indikator ini merepresentasikan sejauh mana data dan informasi statistik yang diproduksi, dianalisis, serta disebarluaskan oleh BPS digunakan secara aktif oleh para pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha, media massa, dan masyarakat umum dalam merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi program, serta mengambil keputusan strategis berbasis bukti (evidence-based policy).

Sasaran Strategis 2:

“Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu”

Sasaran strategis kedua menegaskan komitmen BPS dalam membangun dan memperkuat penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang berkualitas, terintegrasi, dan mampu menjamin konsistensi serta keselarasan data antar-sektor. SSN yang baik menjadi fondasi penting bagi kebijakan publik yang berbasis bukti. Selain itu, dengan adanya penyelenggaraan SSN yang terpadu, seluruh K/L/D/I mampu mendukung perencanaan pembangunan nasional secara komprehensif.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 2 berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**. IPS merupakan indikator komposit yang menilai tingkat kematangan (maturity level) penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indeks ini mencerminkan kemampuan kelembagaan dalam membangun ekosistem statistik sektoral yang terstandar, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis 3:

“Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional”

Sasaran strategis ketiga merupakan manifestasi dari komitmen BPS dalam membangun kelembagaan yang menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), menjunjung tinggi integritas, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi penyediaan data statistik.

Untuk menilai keberhasilan sasaran ini, BPS menggunakan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 berupa Indeks Reformasi Birokrasi**. Indeks ini mengevaluasi tingkat keberhasilan BPS dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi yang mencakup penguatan integritas organisasi, efisiensi proses bisnis, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas layanan publik.

Tabel 2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPS

Tujuan/Sasaran/Indikator
Tujuan 1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan
Sasaran 1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
Indikator Kinerja 1. Tingkat Pemanfaatan Data Statistik
Tujuan 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien
Sasaran 2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu
Indikator Kinerja 2. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Tujuan 3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik
Sasaran 3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional
Indikator Kinerja 3. Indeks Reformasi Birokrasi

Sampai dengan laporan kinerja ini disusun, visi, misi, tujuan di level unit kerja/satuan kerja belum ditetapkan.

2.2 Target Kinerja Biro Perencanaan 2025-2029

Indikator kinerja beserta target yang tercantum dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029. Indikator kinerja, target, dan metadata indikator sebagai berikut:

- **Tujuan 3** : **Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik**
- Sasaran 3.1.1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang berdampak

Indikator 3.1.1.1 : Persentase Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang tepat waktu

Target Renstra : 100 persen

Konsep Definisi : Indikator ini menunjukkan output atas Kegiatan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik, yang diukur dengan laporan yang diterbitkan tepat waktu

Metode Penghitungan :

Rumus:
$$y = \frac{n}{N} \times 100\%$$

y : Persentase Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang tepat waktu

n : Jumlah Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang tepat waktu pada tahun ke-t

N : Jumlah total target Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik pada tahun ke-t

Sumber Data : Penilaian Mandiri oleh Biro Perencanaan

▪ **Tujuan 3 : Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik**

Sasaran 3.2.1 : Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko

Indikator 3.2.1.1 : Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) BPS

Target Renstra : Sangat Baik

Konsep Definisi : Indikator ini merupakan alat ukur untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Indeks ini mengevaluasi sejauh mana rencana pembangunan disusun, diintegrasikan, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Metode Penghitungan : Mengikuti Hasil Penilaian dari Kementerian PPN/Bappenas

Sumber Data : Dokumen Rekomendasi Peningkatan Kualitas Perencanaan K/L dan Pemerintah Daerah dari Kementerian PPN/Bappenas

▪ **Tujuan 3 : Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik**

Sasaran 3.2.1 : Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko

Indikator 3.2.1.2 : Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Target Renstra : 3.70 Poin

Konsep Definisi : Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian internal. Penilaian Maturitas SPIP dilakukan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan SPIP. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan skala 0-5, di mana semakin tinggi nilainya, maka kualitas penyelenggaraan SPIP semakin baik.

Metode Penghitungan : Mengikuti Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dari BPKP

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP

▪ **Tujuan 3 : Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik**

Sasaran 3.2.1 : Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko

Indikator 3.2.1.3 : Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada NKA

Target Renstra : Sangat Baik

Konsep Definisi : Nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) adalah hasil perhitungan dari variabel efektivitas dan efisiensi. NKPA merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Metode Penghitungan : Mengikuti Hasil Penilaian dari Kementerian Keuangan

Sumber Data : Hasil Penilaian dari Kementerian Keuangan

Tabel 3. Dasar hitung dan alasan penetapan target Renstra Biro Perencanaan tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Sinergi	Kategori Satuan	Target					Dasar Penentuan Target
					2025	2026	2027	2028	2029	
<p>Tujuan 3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik</p>										
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang berdampak	Persentase Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang tepat waktu	Persen	-	100	100	100	100	100	<p>Rumus:</p> $y = \frac{n}{N} \times 100\%$ <p>y : Persentase Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang tepat waktu n : Jumlah Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang tepat waktu pada tahun ke-t N : Jumlah total target Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan</p>

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Sinergi	Kategori Satuan	Target					Dasar Penentuan Target
					2025	2026	2027	2028	2029	
										<p>Transformasi Statistik pada tahun ke-t</p> <p>Sumber Data: Penilaian Mandiri oleh Biro Perencanaan Baseline dan dasar penetapan target:</p> <p>Mempertimbangkan histori persentase dokumen/laporan Biro Perencanaan yang 2023-2024 selalu 100 persen.</p>
2	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran	Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) BPS	Predikat	1 = Sangat Baik; 2 = Baik; 3 = Cukup; 4 = Kurang; 5	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	<p>Baseline dan dasar penetapan target:</p> <p>Realisasi 2023 sebesar 97,26 (sangat baik).</p> <p>Realisasi 2024 sebesar 95,15 (sangat baik).</p>

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Sinergi	Kategori Satuan	Target					Dasar Penentuan Target
					2025	2026	2027	2028	2029	
	didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko			= Sangat Kurang						
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin		3,70	3,75	3,80	3,85	3,90	Baseline dan dasar penetapan target: Realisasi 2023 sebesar 3,555 (terdefinisi). Realisasi 2024 sebesar 3,697 (terdefinisi).
		Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada NKA	Kategori	1 = Sangat Baik; 2 = Baik; 3 = Cukup; 4 = Kurang; 5 = Sangat Kurang	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baseline dan dasar penetapan target: Realisasi 2023 sebesar 91,36 (sangat baik). Realisasi 2024 sebesar 99,12 (sangat baik).

2.3 Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025

Pada awal tahun 2025, Biro Perencanaan telah menetapkan target kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sepanjang tahun. Target tersebut dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan Tahun 2025 yang berfungsi sebagai bentuk komitmen Kepala Biro Perencanaan kepada Plt. Sekretaris Utama BPS dalam mewujudkan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan disusun dan ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan dan Plt. Sekretaris Utama BPS setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 ditetapkan. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai dasar dalam pengukuran kinerja organisasi. Dengan adanya perjanjian kinerja ini, Biro Perencanaan memiliki arah yang jelas dalam mencapai target kinerja, serta memastikan bahwa alokasi anggaran digunakan secara efektif dan efisien.

Selain itu, perjanjian kinerja ini juga berperan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja organisasi secara berkelanjutan, sehingga setiap kegiatan yang dijalankan dapat diukur keberhasilannya secara terstruktur, transparan, dan akuntabel.

Rincian penetapan target kinerja Kepala Biro Perencanaan tahun 2025 untuk masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Target Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik			
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang berdampak	Persentase Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang tepat waktu	Persen	100
Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko	Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) BPS	Predikat	Sangat Baik
	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3,70
	Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada NKA	Kategori	Sangat Baik

Tabel ini menyajikan informasi mengenai target kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap indikator selama tahun 2025.

2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL:

1. Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan

Visi Indonesia Emas 2045 menjadi arah pembangunan jangka panjang bangsa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing tinggi pada peringatan 100 tahun kemerdekaan. Untuk memastikan visi besar ini dapat dicapai, diperlukan indikator pembangunan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau secara berkala, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, Badan Pusat Statistik (BPS) memegang peran strategis dalam penyediaan data berkualitas sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Peran ini memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan memiliki landasan bukti yang kuat dan tepat sasaran. Karena itu, sinergi dan kolaborasi yang matang antarinstansi menjadi prasyarat utama dalam mengimplementasikan penyediaan Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan Indikator Utama Pembangunan 2045.

Sebagai pembina data nasional, BPS bertanggung jawab untuk memfasilitasi ketersediaan indikator pembangunan jangka panjang yang dapat digunakan secara konsisten di seluruh tingkatan wilayah. Salah satu tantangan penting adalah memastikan bahwa indikator yang dirumuskan tidak hanya relevan pada level nasional, tetapi juga dapat diturunkan hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui penggunaan indikator proksi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pembinaan Statistik Sektoral

Sejalan dengan Visi BPS 2025–2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini menegaskan peran BPS dalam memastikan

bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan.

3. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi

Dalam rangka mendukung sasaran program prioritas berupa terkendalinya tingkat inflasi nasional sesuai dengan fundamental ekonomi, serta sasaran kegiatan prioritas terkait terjaganya komponen inflasi harga bergejolak, (Direktorat Statistik Harga Konsumen/BPS Provinsi/BPS Kabupaten/Kota) telah melaksanakan berbagai aktivitas strategis secara menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya tersebut diawali dengan perencanaan anggaran serta penyiapan instrumen pendataan dan metodologi, termasuk penyempurnaan instrumen pengolahan data dan penyiapan petugas, guna memastikan terselenggaranya kegiatan statistik harga yang mampu menghasilkan data Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi dan andil inflasi yang akurat, konsisten dan terpercaya. Pelaksanaan pendataan dilakukan setiap bulan melalui Survei Harga Konsumen di 150 kabupaten/kota dengan cakupan periode mingguan, dwi mingguan dan bulanan, sehingga dinamika perubahan harga dapat tercatat secara komprehensif.

Selanjutnya, proses penghitungan IHK, inflasi dan andil inflasi pada tingkat nasional, 38 provinsi, dan 150 kabupaten/kota dilaksanakan melalui mekanisme harmonisasi dan rekonsiliasi antar level harga untuk menjaga konsistensi, integritas dan validitas output yang dihasilkan. Di samping itu, penguatan infrastruktur pendukung terus dilakukan melalui penyediaan dan pemanfaatan instrumen pengumpulan data berbasis aplikasi FASIH serta penyempurnaan instrumen diseminasi guna mendukung efektivitas publikasi dan promosi data inflasi. Penjaminan kualitas dilaksanakan secara konsisten melalui evaluasi internal berupa rapat evaluasi dan penerapan Quality Gate serta evaluasi eksternal melalui mekanisme SIQAF sehingga

proses dan output statistik yang dihasilkan tetap memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

4. Pembinaan Desa Cantik

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS berkewajiban untuk memberikan pembinaan statistik kepada Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya, termasuk hingga tingkat desa, melalui sistem statistik nasional (SSN) yang berkesinambungan sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam peningkatan literasi statistik guna mendukung pembangunan nasional. Salah satu perwujudan amanat UU tersebut adalah dengan dilaksanakannya suatu kegiatan pembinaan statistik sektoral di tingkat desa secara berkesinambungan dan komprehensif, yaitu Program Pembinaan Statistik Sektoral Desa Cinta Statistik (Desa Cantik). Program Desa Cantik yang dirancang oleh BPS secara umum bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan literasi, kesadaran dan peran aktif perangkat desa/kelurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik;
- b. Standardisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik;
- c. Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di desa tepat sasaran;
- d. Membentuk Agen-agen Statistik pada level desa/kelurahan.

PRIORITAS PRESIDEN

1. Survei KSA Padi, Survei Ubinan Padi

Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah, Beras dalam Negeri, serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dilakukan melalui dua kegiatan statistik utama, yaitu Survei KSA Padi dan Survei Ubinan Padi. Survei KSA Padi mencakup seluruh lahan pertanian, baik sawah maupun bukan sawah, dilaksanakan di 38 provinsi dan 488 kabupaten/kota, dengan metode pengumpulan data berbasis survei (sampling) menggunakan CAPI. Sebanyak 281.817 titik amatan dipantau setiap bulan oleh 7.572 petugas dengan metode pengamatan langsung di lapangan. Sementara itu, Survei Ubinan Padi dilakukan untuk memperoleh data produktivitas melalui pengukuran langsung pada 78.626 sampel plot ubinan, dilaksanakan setiap empat bulan oleh petugas BPS. Survei ubinan padi menggunakan pendekatan area berbasis Kerangka Sampel Area (KSA) dengan menggunakan titik

pengamatan pada subsegmen KSA sesuai fase pertumbuhan padi. Dengan melibatkan peranan teknologi, terkini, sehingga data produksi padi yang dikumpulkan menjadi lebih akurat, cepat dan tepat waktu. Kedua survei dilengkapi dokumentasi foto kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas.

2. Kemiskinan Ekstrem

Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem diwujudkan melalui aktivitas utama, salah satunya penghitungan tingkat kemiskinan ekstrem secara berkala.

3. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses pangan bergizi terutama bagi masyarakat miskin, serta penguatan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam penyediaan makan bergizi. Dampak program MBG secara komprehensif diukur melalui Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, yang terdiri dari Survei Khusus dan Survei Baseline. Dampak program MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial diukur melalui Survei Khusus. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap pelaku usaha penyedia layanan makanan, serta perubahan konsumsi dan perilaku rumah tangga dari siswa yang menerima MBG.

Responden Survei Khusus merupakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Supplier (penyedia bahan baku), Sekolah, serta rumah tangga dan siswa yang menerima MBG. Survei Baseline dilakukan untuk mengukur pengaruh MBG yang diberikan untuk anak sekolah terhadap indikator ketenagakerjaan, perubahan konsumsi rumah tangga, serta perubahan perilaku siswa dan rumah tangga terhadap pola makan bergizi di rumah tangga. Responden Survei Baseline adalah rumah tangga dan siswa baik yang sudah atau belum menerima program MBG dan dilakukan secara panel. Pelaksanaan Survei Khusus Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan dua kali, yaitu pada bulan Juni (Tahap I) dan November (Tahap II) tahun 2025, sementara Survei Baseline pada bulan Juli (Tahap I) dan November (Tahap II) 2025. Rangkaian kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG dimulai dari tahap perencanaan (penyusunan rancangan metodologi, instrumen pendataan berupa kuesioner dan buku pedoman, pengembangan moda pencacahan dan web monitoring melalui aplikasi FASIH dan pelatihan petugas), tahap

pemutakhiran dan pendataan lapangan, tahap evaluasi (pelaksanaan supervisi, pemeriksaan anomali hasil pendataan, serta penyelenggaraan rapat evaluasi dan koordinasi) hingga penyusunan tabulasi dan analisis hasil pendataan.

ISU STRATEGIS NASIONAL

1. Survei Kesejahteraan Petani

Survei Kesejahteraan Petani (SKP) merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan BPS. Survei ini dilakukan untuk menghasilkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai instrumen pengukuran berbasis data yang mencerminkan kondisi kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian (RTUP). Cakupan survei meliputi 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota dengan populasi responden RTUP pada enam subsektor pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei berbasis sampling dengan moda CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing), menggunakan metode wawancara oleh 3.022 Petugas Pendataan Lapangan dan Petugas Pemeriksaan Lapangan.

2. Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Neraca Arus Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah melalui beberapa tahapan penting. Pada tahap perencanaan, telah dilakukan pembahasan metodologi neraca arus energi dan emisi GRK berbasis System of Environmental Economic Accounts (SEEA) Central Framework. Selain itu koordinasi dengan Direktorat Statistik Industri sebagai penanggung jawab kegiatan (PJK) terkait di BPS dan Kementerian/Lembaga (K/L) seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bank Indonesia untuk memastikan kesesuaian konsep serta ketersediaan data. Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan pengumpulan dan integrasi data dari berbagai sumber kompilasi produk administratif.

3. Data Komoditas Gula, Pergaraman, Jagung, Beras, Daging Lembu, Perikanan, Bawang Putih

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 61 Tahun 2024 mengenai Neraca Komoditas serta

Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, telah dilakukan kegiatan penyediaan data komoditas pangan strategis sebagai bahan evaluasi ketersediaan pasokan pangan nasional. Aktivitas ini berfokus pada pengumpulan, penyusunan, dan penyediaan data yang akurat untuk mendukung perencanaan kebutuhan pasokan dan memastikan stabilitas pangan nasional.

Dalam penyediaan data komoditas tersebut, Direktorat/BPS Provinsi/BPS Kabupaten/Kota berperan melaksanakan survei terkait seperti Pengumpulan Data Luas Panen Tanaman Pangan, Survei Ubinan Tanaman Pangan, Pendataan Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB), Pendataan Laporan Triwulanan Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan (PP/TPI), Pendataan Laporan Triwulanan Perndaratan Ikan Tradisional (PIT), Pendataan Tahunan Perusahaan Budidaya Ikan (LTB), dan Pendataan Tahunan Perusahaan Penangkapan Ikan (LTP).

DUKUNGAN BIRO PERENCANAAN

Dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan isu strategis nasional, Biro Perencanaan di lingkungan Badan Pusat Statistik berperan sebagai penopang strategis dari sisi perencanaan dan penganggaran, meskipun tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan program prioritas. Biro Perencanaan memastikan bahwa berbagai kegiatan statistik yang mendukung prioritas nasional, seperti penyusunan Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK, Survei Kesejahteraan Petani, penguatan neraca komoditas pangan strategis, serta persiapan Sensus Ekonomi 2026 didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai, berkelanjutan, dan selaras dengan arah kebijakan RPJPN dan RPJMN 2025–2029. Dukungan ini mencakup pengawalan alokasi anggaran lintas program dan kegiatan agar mampu menjawab kebutuhan data strategis untuk transisi energi, ketahanan pangan, dan pembangunan ekonomi nasional.

Sejalan dengan Prioritas Presiden, Biro Perencanaan juga berperan memastikan kesiapan dukungan anggaran dan standar biaya bagi kegiatan statistik yang menopang program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Survei KSA dan Ubinan Padi, serta penghitungan kemiskinan ekstrem. Melalui penyusunan dan pengendalian standar biaya, termasuk pemastian kesesuaian rate Honorarium Kegiatan Statistik (HKS), Biro Perencanaan memastikan pelaksanaan kegiatan lapangan berjalan efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas data. Selain itu, Biro Perencanaan mengawal manajemen mitra statistik agar keterlibatan petugas lapangan dan pihak terkait dapat berlangsung secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan, sehingga

mendukung ketepatan sasaran kebijakan perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dalam konteks isu strategis nasional dan transformasi tata kelola pemerintahan, Biroren berkontribusi melalui penguatan perencanaan program dan penganggaran untuk penyediaan data pembangunan nasional, termasuk 5 Sasaran Visi Indonesia Emas, 45 Indikator Utama Pembangunan, pengembangan statistik sektoral, pemanfaatan Big Data untuk statistik resmi, serta pembinaan Desa Cantik. Peran ini memastikan bahwa inisiatif penguatan Sistem Statistik Nasional didukung oleh kerangka perencanaan dan pembiayaan yang konsisten, terukur, dan berorientasi hasil. Dengan demikian, Biro Perencanaan menjadi elemen kunci yang menjamin keberlangsungan dan kualitas dukungan statistik BPS terhadap prioritas nasional dan presiden, melalui fondasi perencanaan, standar biaya, dan tata kelola pelaksanaan yang solid.

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Total pagu anggaran Biro Perencanaan pada awal tahun 2025 yaitu sebesar **Rp7.690.761.000**. Kebijakan penghematan anggaran menyebabkan total pagu yang dapat digunakan hingga akhir tahun sebesar **Rp4.250.793.000***. Pagu awal dan pagu akhir anggaran Biro Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Pagu Total dan Pagu yang Dapat Digunakan pada Tahun 2025

Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output (RO)		Pagu Total		Pagu yang dapat Digunakan *)	
		Pagu (Rp)	% terhadap Pagu Total	Pagu (Rp)	% terhadap Pagu Total
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
2881	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	7.690.761.000	100,00	4.250.793.000	100,00
	2A5 Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I	231.855.000	3,01	145.246.000	3,42
	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.367.037.000	43,78	1.369.905.000	32,23
	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	155.392.000	2,02	64.490.000	1,52
	961 Layanan Reformasi Kinerja	3.936.477.000	51,18	2.671.152.000	62,84
Pagu Total Biro Perencanaan		7.690.761.000	100,00	4.250.793.000	100,00

*) Nilai pagu ini masih memperhitungkan blokir

Tim 14 Reformasi Birokrasi

1. Pelaksanaan RB
2. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas

Tim 11 SAKIP

Perjanjian Kinerja BPS: Januari s.d. Desember
Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja (SAKIP) PS Pu
Monitoring dan Evaluasi Kinerja (SAKIP)
BPS dan wulan...
Lap... a Bi...
De... (1) s...
5. L... rja B... ber (... oruari...
6. L... rja f... nan...
7. Pe... gan... anu... ember

Triwulanan

A

Tim 11 Kele

Tim

Ren

Per

Per

an: T

(UP)

n-1)

Manajemen Perub

Manajemen Perubahan: P...
idnya Organisasi: Februa...
sasi Core Value BerAKH...
ngunan Agen Perubah...

BIRO PEREN

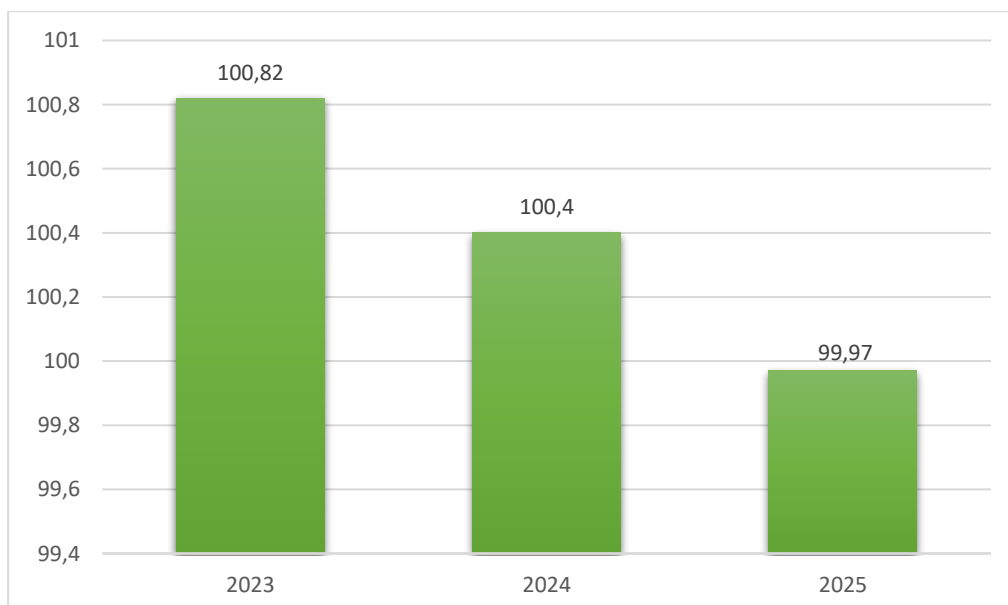
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

BAB 3. Akuntabilitas Kinerja

3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Uker/SatkerTahun 2025

Analisis capaian kinerja merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan akuntabilitas kinerja sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja. Selain itu, analisis capaian kinerja berfungsi untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan serta solusi yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala. Dengan mengetahui penyebab keberhasilan maupun ketidaktercapaian target, dapat dilakukan evaluasi secara objektif dan terukur. Analisis capaian kinerja juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan perencanaan pada periode selanjutnya. Hasil analisis digunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan, penetapan program prioritas, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan realisasi yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan untuk setiap indikator. Capaian kinerja total dihitung dari rata-rata capaian kinerja dari seluruh Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan.



Gambar 4. Capaian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023 - 2025

Capaian kinerja Biro Perencanaan tahun 2025 sebesar 99,97 persen merupakan angka sementara menggunakan capaian kinerja tahun 2024. Hal ini dikarenakan Nilai Kinerja

Perencanaan Anggaran (NKPA) pada NKA tahun 2025 belum dirilis. Dalam tiga tahun terakhir, NKPA Biro Perencanaan menunjukkan tren menurun. Secara umum, tren menurun ini menunjukkan bahwa proses perencanaan hingga pelaporan keuangan memiliki kendala yang perlu segera diatasi. Tren menurun pada capaian NKPA ini juga merupakan sinyal penting untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap siklus pengelolaan anggaran. Dengan langkah perbaikan yang tepat sasaran, diharapkan kinerja pelaksanaan anggaran pada periode mendatang dapat kembali meningkat, selaras dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel.

PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang mengacu pada Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024. PKO dilakukan dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu capaian perjanjian kinerja dan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja. Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai gambar berikut:

Tabel 6. Predikat PKO

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG

Setiap predikat PKO memiliki makna yang menggambarkan tingkatan kualitas capaian kinerja organisasi. Terjemahan pada setiap predikat adalah sebagai berikut:

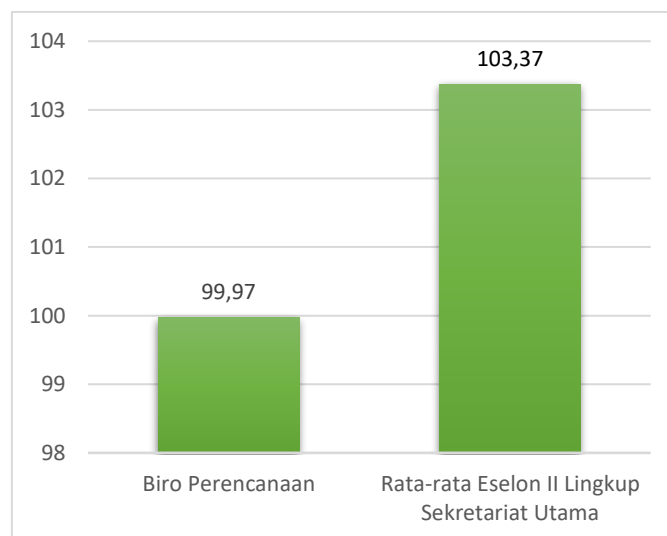
Tabel 7. Interpretasi Predikat PKO

Predikat Kinerja Organisasi	Interpretasi
ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target.
KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target.
SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Biro Perencanaan sebesar 89,98 persen dengan predikat "Baik" menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen kinerja telah berjalan secara efektif dan sesuai ekspektasi. Hasil ini membuktikan komitmen Biro Perencanaan dalam mencapai target strategis serta menjaga akuntabilitas kinerja secara konsisten sepanjang tahun 2025.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 TERHADAP RATA-RATA CAPAIAN KINERJA UNIT KERJA ESELON II LINGKUP SEKRETARIAT UTAMA

Capaian kinerja Biro Perencanaan dibandingkan rata-rata capaian kinerja unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Utama:



Gambar 5. Perbandingan Capaian Kinerja Biro Perencanaan

Berdasarkan gambar di atas, Biro Perencanaan memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Sekretariat Utama. Sebagai langkah tindak lanjut terhadap capaian kinerja tahun 2025, Biro Perencanaan telah mengidentifikasi beberapa strategi penguatan untuk memastikan seluruh target tercapai secara optimal di masa mendatang. Upaya-upaya tersebut mencakup:

1. Penguatan Kolaborasi dan Koordinasi Strategis

Mengingat terdapat indikator yang penilaiannya dilakukan oleh pihak eksternal dan memerlukan keterlibatan unit kerja lain, maka koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Biro Perencanaan berkomitmen untuk meningkatkan intensitas diskusi dan forum evaluasi berkala guna menyelaraskan persepsi serta mengumpulkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

2. Optimasi Mitigasi Risiko Operasional

Biro Perencanaan akan memperdalam analisis potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target. Melalui pengelolaan risiko yang lebih terstruktur, biro dapat meminimalkan kerugian, meningkatkan efisiensi operasional, serta menyiapkan rencana cadangan (contingency plan) dan strategi pemulihan yang solid untuk menjaga keberlangsungan kinerja di tengah gangguan.

3. Penyesuaian Tata Kelola Berbasis Rekomendasi

Melakukan penyempurnaan proses bisnis dan tata kelola internal dengan merujuk pada rekomendasi hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB. Langkah ini diambil untuk memastikan standar kerja Biro Perencanaan tetap relevan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA PER SASARAN TAHUN 2023-2025

Capaian kinerja per sasaran strategis merupakan rata-rata capaian indikator kinerja yang terdapat pada masing-masing sasaran strategis. Biro Perencanaan memiliki 2 sasaran strategis yaitu Sasaran 1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak, dan Sasaran 2 Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran Didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko. Pada tahun 2025, Sasaran Strategis Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran Didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko tidak mencapai target dengan capaian kinerja 99,97 persen.

Tabel 8. Capaian Kinerja Biro Perencanaan
menurut Sasaran Strategis Tahun 2023-2025 (%)

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025*)	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sasaran 1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak										100
Persentase Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Tepat Waktu	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100	N/A (Belum dijadikan indikator)			N/A (Belum dijadikan indikator)			100
Sasaran 2. Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran Didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko										99,97
Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) BPS	Predikat	N/A (Belum dijadikan indikator)	Sangat Baik	N/A (Belum dijadikan indikator)			N/A (Belum dijadikan indikator)			100
Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	N/A (Belum dijadikan indikator)	3,7	N/A (Belum dijadikan indikator)			N/A (Belum dijadikan indikator)			99,92
Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada NKA	Kategori	N/A (Belum dijadikan indikator)	Sangat Baik	N/A (Belum dijadikan indikator)			N/A (Belum dijadikan indikator)			100

*)Target 2025 diambil dari target PK terakhir

Capaian kinerja organisasi pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat optimal pada dua sasaran strategis utama. Sasaran 1, terkait perwujudan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak, berhasil terealisasi sepenuhnya sebesar 100 persen. Sementara itu, Sasaran 2 yang berfokus pada efektivitas dan efisiensi perencanaan serta penganggaran melalui manajemen risiko, mencapai kinerja sebesar 99,97 persen..

Capaian ini menunjukkan keberhasilan Biro Perencanaan dalam melaksanakan transformasi dan mengelola sumber daya secara disiplin. Hasil yang tinggi pada kedua sasaran

tersebut membuktikan bahwa kerja sama antara perbaikan birokrasi dan perencanaan anggaran yang tepat telah berjalan efektif serta sesuai dengan target.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2025 MENURUT INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Tepat Waktu

Indikator ini berhasil mencapai target kinerja maksimal sebesar 100 persen pada tahun 2025. Capaian ini merupakan hasil dari kedisiplinan dalam memenuhi setiap tenggat waktu penyusunan dokumen serta koordinasi yang baik antar unit kerja. Keberhasilan mencapai target maksimal ini membuktikan bahwa sistem pelaporan administrasi telah berjalan dengan efektif, sehingga agenda terkait transformasi statistik dan reformasi birokrasi dapat terpantau secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik.

Tabel 9. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja pada Indikator Persentase Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Tepat Waktu

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Akhir Renstra di Tahun 2025	Target PK 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
Persentase Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100

Kendala yang dihadapi:

Secara keseluruhan, pelaksanaan program kerja strategis dan administratif di Biro Perencanaan mengalami hambatan signifikan serta keterlambatan jadwal akibat belum tersedianya payung hukum dan pedoman teknis dari kementerian pusat, belum finalnya metadata IKU dan struktur organisasi (SOTK) baru, serta adanya kendala koordinasi internal yang dipicu oleh keterbatasan anggaran, kesibukan tim pada proyek prioritas lain, dan status tim kerja yang bersifat *ad-hoc*. Selain itu, terdapat perbedaan pemahaman antar unit kerja, keterbatasan data pendukung untuk kerja sama internasional (BRICS dan OECD), serta perubahan jadwal kegiatan yang menyebabkan proses evaluasi, penyusunan Renstra, dan formalisasi berbagai Peraturan Badan (Perban) menjadi tidak maksimal dan terus tertunda.

Solusi yang telah dilakukan:

Untuk mengatasi hambatan regulasi pusat dan keterbatasan anggaran, organisasi melakukan akselerasi teknis melalui penyelarasan metadata IKU dan SOP via *sprint meeting*, melakukan penerjemahan dokumen secara mandiri, serta mengintegrasikan jadwal kegiatan yang tumpang tindih guna menjaga efektivitas kerja tim *ad-hoc*. Langkah komprehensif ini mencakup penguatan koordinasi intensif dengan kementerian terkait (PANRB dan Bappenas), restrukturisasi tim RB dan EPSS, serta pemenuhan data krusial untuk JSP BRICS dan narasi *self-assessment* OECD guna memastikan target strategis tetap tercapai di tengah transisi SOTK dan kebijakan nasional.

Tindak lanjut:

Sebagai langkah tindak lanjut, dilakukan finalisasi aspek regulasi melalui penyelesaian metadata dan Perka IKU, harmonisasi Perban Renstra 2025-2029 bersama Bappenas, serta perbaikan draf Perban FWA dan buku SOP Biro Perencanaan secara komprehensif. Secara paralel, penguatan fungsi strategis dilakukan melalui pembersihan data dan narasi JSP BRICS, pemetaan kebutuhan AI berbasis GAMS0, persiapan *technical review* OECD, serta sinkronisasi instrumen EWS-BCS dengan SE 2027. Pada aspek reformasi birokrasi, langkah mencakup penetapan Rencana Aksi RB 2025, pemutakhiran tata kelola EPSS, pembinaan ZI berkelanjutan, serta evaluasi program FWA dan PUG. Seluruh rangkaian kegiatan ini diintegrasikan melalui koordinasi intensif dengan pimpinan untuk pembentukan tim integrasi statistik, pengajuan rewiu SK Tim RB, serta sinkronisasi beban kerja pegawai guna menjamin pencapaian output triwulanan yang akuntabel.

Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) BPS

Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) BPS pada tahun 2025 berhasil mencapai target 100 persen dengan predikat Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan konsistensi kinerja yang optimal, di mana realisasi mampu memenuhi target Perjanjian Kinerja (PK) sekaligus target akhir Renstra 2025 secara tepat. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan yang sistematis dan selaras dengan sasaran strategis, sehingga menjamin seluruh program kerja memiliki landasan pelaksanaan yang akuntabel.

Tabel 10. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja pada Indikator Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) BPS

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Akhir Renstra di Tahun 2025	Target PK 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) BPS	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	100

Kendala yang dihadapi:

Kendala utama mencakup belum tuntasnya aspek regulasi seperti penetapan rancangan Perka BPS tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025 serta Tahun 2026, rewi Perka Tata Kelola Mitra Statistik, dan Masterplan SE2026 yang terhambat proses hukum serta perubahan kebijakan. Secara teknis, pelaksanaan terganggu oleh belum lengkapnya dokumen pendukung pengadaan TI, ketidaksesuaian volume usulan dengan RKBMN 2026, standar RAB/TOR yang belum seragam, serta performa aplikasi SAKTI dan FASIH yang tidak optimal. Pada sisi operasional dan sistem, keterbatasan SDM di Direktorat SIS menyebabkan keterlambatan pengembangan aplikasi Iplan dan Masterplan, yang juga dibarengi dengan ketidakjelasan dasar honorarium petugas lapangan. Selain itu, terdapat hambatan terkait terbatasnya tenggat waktu penyusunan pagu anggaran 2026.

Solusi yang telah dilakukan:

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan mencakup koordinasi intensif dengan tim hukum untuk mempercepat penetapan rancangan Perka BPS tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025 serta Tahun 2026, termasuk proses harmonisasi NWP SE2026 dan rewi tata kelola mitra statistik. Secara teknis, telah dilakukan konfirmasi kepada unit kerja (PJK) untuk melengkapi dokumen pengadaan TI, penyesuaian volume usulan dengan RKBMN 2026 melalui Biro Umum, serta standarisasi RAB/TOR dengan pengusulan periode perubahan yang lebih teratur.

Pada aspek pelaksanaan kegiatan, tindakan yang diambil meliputi penyediaan uraian tugas dan beban kerja petugas SE 2026, pendampingan pendataan SHBJ-SSB melalui grup koordinasi, serta penginputan data pada aplikasi SAKTI di waktu beban puncak rendah. Selain itu, upaya percepatan pengembangan sistem dilakukan melalui koordinasi dengan Direktorat SIS serta ujicoba aplikasi Iplan dan Masterplan, yang diintegrasikan dengan

pemantauan progres *clearance* SPBE pada aplikasi EGA serta koordinasi sinkronisasi anggaran bersama Bappenas dan DJA.

Tindak lanjut:

Sebagai langkah tindak lanjut, dilakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Sistem Informasi Statistik untuk melengkapi dokumen pendukung pengadaan TI serta penyesuaian volume usulan agar selaras dengan RKBMN. Di sisi regulasi, percepatan penetapan rancangan Perka BPS tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025 terus dikawal melalui komunikasi rutin dengan tim hukum. Status untuk uraian tugas serta beban kerja Koseka telah terselesaikan melalui surat resmi dari unit kerja terkait sebagai bagian dari penyelesaian hambatan administratif.

Upaya ini dibarengi dengan sinkronisasi data bersama Bappenas dan DJA, serta finalisasi matriks perubahan substansi SE2026 dan rancangan Perka NWP SE2026. Untuk penguatan sistem, dilakukan penyusunan kebutuhan aplikasi tahun 2025, koordinasi pemutakhiran data aset TI eksisting, serta pemantauan intensif terhadap progres *clearance* belanja SPBE pada aplikasi EGA. Selain itu, telah ditentukan periode perubahan standar biaya kegiatan guna menjamin ketertiban administrasi, sembari menunggu arahan kebijakan lebih lanjut mengenai tata kelola petugas statistik dan penentuan beban kerja uji coba SE lanjutan.

Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan capaian sebesar 99,92 persen, dengan realisasi sementara sebesar 3,697 poin dari target yang ditetapkan sebesar 3,70 poin. Angka ini menggunakan nilai tahun 2024 mengingat hasil evaluasi untuk periode 2025 masih dalam proses finalisasi.

Meskipun secara angka terdapat selisih sangat tipis dari target Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK), capaian ini tetap menunjukkan kualitas pengendalian intern yang sangat tinggi. Kinerja yang dilakukan difokuskan pada penguatan manajemen risiko dan pengawasan internal yang konsisten, guna memastikan organisasi tetap berjalan di jalur yang benar dan meminimalisir hambatan operasional.

Tabel 11. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja pada Indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Akhir Renstra di Tahun 2025	Target PK 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,70	3,70	3,697*	99,92*

* Menggunakan nilai tahun 2024 karena LHE 2025 dari BPKP belum diterima

Kendala yang dihadapi:

Kendala utama dalam sistem pelaporan dan tata kelola mencakup hambatan teknis pada aspek aplikasi dan infrastruktur digital. Operasional aplikasi SAKTI dan Monev Kemenkeu yang mengalami kendala teknis serta pemeliharaan berkala telah menghambat proses entri capaian output dan pelaporan rutin. Selain itu, pengembangan aplikasi SINERGI cenderung stagnan dan belum mampu mengakomodasi kebutuhan fitur pemantauan serta unggah dokumen kelengkapan secara optimal.

Pada aspek regulasi dan kelembagaan, belum disahkannya SOTK baru serta tertundanya pelantikan pejabat mengakibatkan proses finalisasi produk hukum, seperti Perban Manajemen Risiko dan SPIP, menjadi terhambat. Hal ini juga berdampak pada dokumen strategis lainnya, di mana belum tersedianya dasar hukum seperti Perpres RAN P4GN 2025-2029 mengakibatkan beberapa laporan rencana aksi tidak dapat dilaksanakan.

Selain itu, terdapat hambatan dalam koordinasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Sulitnya konsultasi dengan instansi eksternal seperti KemenPANRB dan padatnya agenda pimpinan menyebabkan seringnya terjadi penjadwalan ulang rapat-rapat strategis. Situasi ini diperberat oleh terbatasnya jumlah personil yang memiliki keahlian spesifik dalam pengembangan sistem, desain publikasi, serta penyusunan materi pembelajaran digital atau *microlearning*.

Solusi yang telah dilakukan:

Sebagai langkah solusi untuk mengatasi berbagai hambatan pelaporan dan tata kelola, telah dilakukan upaya-upaya diantaranya penyusunan Laporan Capaian Output Januari–Maret dilakukan secara manual menggunakan lembar kerja untuk mengantisipasi kendala aplikasi SAKTI. Koordinasi intensif dijalankan dengan tim Kemenkeu dan Bappenas guna sinkronisasi komponen anggaran serta pemantauan pemeliharaan sistem. Selain itu, pengarsipan data IKPA dipastikan tertib sebagai basis dokumentasi.

Reviu Perban disesuaikan dengan SOTK baru dan dituangkan dalam Berita Acara bersama Inspektorat. Pembaruan berkas pada sistem ESR KemenPANRB dan koordinasi dengan sekretaris eselon I juga terus diupayakan untuk percepatan legalitas dokumen kinerja.

Sasaran dan nomenklatur IKU disinkronkan guna membentuk basis data PK, didukung dengan penyediaan lembar kerja target dan internalisasi kertas kerja monitoring kepada seluruh unit kerja. Laporan Kinerja Lembaga triwulanan juga disusun secara rutin sebagai bahan evaluasi pimpinan mengenai capaian, kendala, dan rencana tindak lanjut.

Manajemen waktu dan pembagian beban kerja personel dioptimalkan untuk mempercepat pengembangan fitur aplikasi SINERGI. Peningkatan kompetensi tim dilakukan melalui pembelajaran mandiri terkait Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Koordinasi penyusunan video dan standarisasi desain publikasi juga dilakukan untuk mengatasi keterbatasan teknis di unit kerja.

Tindak lanjut:

Tindak lanjut yang dilakukan meliputi penyempurnaan dan finalisasi outline publikasi Aktivitas BPS 2025 sebagai dasar penyusunan naskah dan pengumpulan bahan dukung. Koordinasi dengan PIC BNN dan pihak terkait terus dilanjutkan guna memastikan kesiapan pelaksanaan RAN P4GN 2025–2029 setelah Perpres disahkan dan disosialisasikan. Hasil internalisasi aplikasi SINERGI ditindaklanjuti dengan optimalisasi penggunaan dan pemantauan implementasinya di unit kerja. Hasil rapat dan pemeriksaan Monev Capkin Triwulan IV 2025 serta monitoring dan reviu Renstra digunakan sebagai dasar penyempurnaan target dan penetapan PK 2026. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan dan finalisasi LAKIN pada seluruh tingkatan untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan pelaporan kinerja. Diskusi kriteria SAKIP 2026 ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penetapan SK Tim SAKIP 2026 serta persiapan langkah implementasinya.

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada NKA

Realisasi Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mencapai 100 persen dengan predikat Sangat Baik. Namun, capaian ini merupakan angka sementara, menggunakan realisasi tahun 2024 karena Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) pada NKA tahun 2025 belum dirilis. Capaian ini menunjukkan kesesuaian penuh antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja (PK) serta target akhir Renstra. Kinerja yang dilakukan berfokus pada kedisiplinan jadwal revisi anggaran dan ketepatan alokasi

belanja terhadap output, sehingga memastikan pengelolaan keuangan tetap efisien, akuntabel, dan mendukung sasaran strategis secara optimal.

Tabel 12. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja pada Indikator Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada NKA

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Akhir Renstra di Tahun 2025	Target PK 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)
Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada NKA	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik*	100*

- Menggunakan realisasi tahun 2024

Kendala yang dihadapi:

Kendala utama mencakup kebijakan efisiensi anggaran dengan tenggat revisi DIPA yang sangat sempit, serta dinamika usulan revisi dan perubahan penandatanganan dokumen yang berulang. Pergantian mitra kerja di DJA dan batas waktu pemblokiran anggaran yang ketat menuntut koordinasi ulang, sekaligus memicu kekhawatiran terhadap target penyerapan anggaran di daerah.

Pada sisi sistem dan administrasi, ketidakstabilan aplikasi Srikandi, kendala TTE, serta proses manual pemutakhiran pagu SIRUP menyebabkan hambatan signifikan pada kelancaran persuratan dan pengadaan. Selain itu, keterbatasan waktu pengerjaan tugas mendesak sering kali berbenturan dengan beban kerja rutin, yang diperparah oleh format dokumen yang belum sesuai Tata Naskah Dinas serta rincian anggaran yang kurang akurat.

Terdapat pula kendala dalam proses diseminasi, seperti keterbatasan materi konten media sosial dan kebutuhan revisi desain yang berulang. Hal ini disebabkan oleh sempitnya waktu persiapan paparan pimpinan serta keterbatasan pemahaman teknis materi konten oleh tim penyusun desain.

Solusi yang telah dilakukan:

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan anggaran dan operasional yaitu penyesuaian yang dilakukan sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran dengan menyusun serta mematuhi *timeline* revisi secara ketat. Koordinasi intensif dijalankan dengan pihak DJA dan kementerian terkait untuk mempercepat penerbitan DIPA serta memproses pergeseran alokasi anggaran yang diperlukan.

Di tingkat internal, penguatan sinergi dilakukan melalui komunikasi rutin dengan PIC unit kerja, Bendahara Pengeluaran, PPSPM, dan PPK. Monitoring berkala bersama Unit Layanan Pengadaan (ULP) juga dilaksanakan guna memastikan kesesuaian tipe pengadaan dengan POK terbaru. Untuk kendala sistem, dilakukan pembuatan akun bagi seluruh pegawai terkait, prosedur *re-login*, serta koordinasi dengan admin TTE guna menjaga stabilitas persuratan.

Efisiensi kerja ditingkatkan melalui pembagian tugas desain yang lebih proporsional dan penyediaan *template* siap pakai. Alur koordinasi antara penyedia materi dan penyusun desain dipertegas dengan pemberian *brief* yang singkat, jelas, serta revidi konten sebelum tahap visualisasi. Selain itu, dibentuk "bank data" bahan infografis dan pengumpulan bahan dari kegiatan internal untuk menjamin ketersediaan materi publikasi secara mandiri.

Tindak lanjut:

Rencana tindak lanjut akan difokuskan pada pelaksanaan revisi DIPA untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan sensus dan survei. Selain itu, tim akan menyusun pagu alokasi 2026 serta melakukan finalisasi DIPA BPS 2026, termasuk mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 kepada Presiden dan Menteri Keuangan.

Pada aspek tata kelola keuangan dan pengadaan, akan dilakukan penetapan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan serta pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2026. Koordinasi intensif dengan PIC unit kerja, Bendahara, PPSPM, PPK, serta Unit Layanan Pengadaan (ULP) terus diperkuat guna memastikan kesesuaian tipe pengadaan dengan POK terbaru.

Guna mendukung kelancaran operasional dan publikasi, tim akan menetapkan alur koordinasi yang jelas antara penyedia materi dan penyusun desain, termasuk penerapan revidi konten sebelum tahap desain. Penggunaan *template* desain juga akan dioptimalkan untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan pimpinan, diikuti dengan agenda internal seperti sesi dokumentasi foto tim kerja Biro Perencanaan 2026.

Berdasarkan hasil pemantauan sepanjang tahun berjalan, kinerja tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik dimana sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil mencapai target yang ditetapkan meskipun dihadapkan pada berbagai kendala. Seluruh capaian IKU tahun ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi keberlanjutan program strategis serta penyusunan perencanaan kinerja yang lebih baik pada tahun anggaran mendatang.

3.2 Capaian Kinerja Biro Perencanaan Terhadap Target Renstra

Tabel 13. Capaian Kinerja terhadap Target Renstra

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
Sasaran 3. 1.1							
IKU 3.1.1.1	Persentase dokumen Laporan/Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 3. 2.1							
IKU 3.2.1.1	Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) BPS	Predikat	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	100	100
IKU 3.2.1.2	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Inetrn Pemerintah (SPIP)	Poin	3,7	3,9	3,697*	99,92	94,79
IKU 3.2.1.3	Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada NKA	Predikat	Sangat baik	Sangat baik	Sangat Baik*	100	100

* angka sementara tahun 2024, angka 2025 belum tersedia

Sasaran 3.1.1 diarahkan pada terwujudnya tata kelola organisasi yang akuntabel melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik. Hal ini diukur melalui IKU 3.1.1.1 Persentase dokumen Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang disusun dan disampaikan tepat waktu. Pada tahun 2025, realisasi indikator ini pada Biro Perencanaan mencapai 100 persen, sesuai dengan target tahun 2025 dan target jangka menengah tahun 2029 yang juga sebesar 100 persen. Dengan demikian, capaian terhadap target tahun 2025 dan 2029 masing-masing telah tercapai 100 persen, menunjukkan

konsistensi kinerja dan komitmen unit kerja dalam mendukung tata kelola organisasi yang baik.

Selanjutnya, Sasaran 3.2.1 berfokus pada penguatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian internal. Pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator kinerja utama. IKU 3.2.1.1 Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) BPS pada tahun 2025 menunjukkan predikat "Sangat Baik", sesuai dengan target tahun 2025 maupun target tahun 2029. Capaian indikator ini mencapai 100 persen terhadap kedua target, yang mencerminkan kualitas perencanaan pembangunan yang telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Untuk IKU 3.2.1.2 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 3,7 poin sedangkan target pada tahun 2029 sebesar 3,9 poin. Realisasi tahun 2025 tercatat sebesar 3,697 poin, atau mencapai 99,92 persen dari target tahun 2025. Sementara itu, capaian terhadap target jangka menengah tahun 2029 mencapai 94,79 persen, yang menunjukkan bahwa implementasi pengendalian internal telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan penguatan pada beberapa aspek agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

Adapun IKU 3.2.1.3 Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada NKA ditargetkan memperoleh predikat "Sangat Baik" baik pada tahun 2025 maupun tahun 2029. Meskipun data realisasi tahun 2025 belum tersedia, capaian terhadap target tahun 2025 dan 2029 masing-masing tercatat sebesar 101,11 persen, yang mengindikasikan bahwa kinerja perencanaan anggaran berada di atas target yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terakhir yang tersedia.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada Sasaran 3.1.1 dan Sasaran 3.2.1 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan sebagian besar indikator telah memenuhi atau melampaui target. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, serta penguatan tata kelola dan pengendalian internal di lingkungan BPS.

Keberhasilan Biro Perencanaan dalam mencapai target kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong utama yang bekerja secara sinergis. Pertama, digitalisasi sistem dan transformasi teknologi telah menjadi katalis utama dalam meningkatkan akurasi, kecepatan, dan transparansi proses kerja. Implementasi aplikasi perencanaan dan penganggaran berbasis digital seperti SAKTI, SIRUP, serta pengembangan dashboard monitoring real-time memungkinkan deteksi dini terhadap potensi keterlambatan atau deviasi

anggaran, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil. Kedua, koordinasi dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal antar unit kerja BPS maupun eksternal dengan Kemenkeu, Bappenas, dan KemenPANRB, telah menciptakan sinergi yang solid dalam menyelaraskan persepsi dan menyelesaikan hambatan secara kolektif melalui forum-forum koordinasi rutin yang efektif. Ketiga, kualitas sumber daya manusia yang mumpuni menjadi modal fundamental, di mana 97 persen pegawai berpendidikan minimal S1 dan 91 persen memiliki keahlian fungsional yang relevan seperti Perencana, Analis Anggaran, dan Statistisi. Kemampuan SDM dalam beradaptasi dengan perubahan kebijakan dan teknologi, serta dedikasi tinggi dalam menyelesaikan tugas, menjadi faktor penentu dalam mencapai target. Keempat, perencanaan yang sistematis dan adaptif tercermin dari penyusunan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan yang matang dan selaras dengan arah kebijakan nasional, serta kemampuan melakukan prioritas kegiatan secara cepat dan tepat ketika terjadi kebijakan efisiensi anggaran, sehingga program prioritas tetap terlindungi. Kelima, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko yang konsisten membantu meminimalisir penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, serta memungkinkan organisasi mengantisipasi potensi hambatan secara proaktif sebelum menjadi masalah serius.

Di sisi lain, pencapaian target kinerja juga menghadapi berbagai faktor penghambat yang cukup signifikan. Pertama, ketidakpastian kebijakan eksternal, terutama kebijakan efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, memberikan dampak paling besar dengan pemotongan pagu anggaran Biro Perencanaan mencapai Rp4,25 miliar atau 55 persen dari pagu awal. Hal ini memaksa seluruh perencanaan ulang dilakukan dalam waktu sangat singkat dan menciptakan ketidakpastian dalam menyusun rencana jangka menengah. Kedua, keterlambatan dan ketidakpastian regulasi, seperti belum finalnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru serta berbagai Peraturan Badan turunan, menghambat proses finalisasi dokumen perencanaan, legalitas kegiatan, dan menyebabkan ketidakjelasan pembagian tugas dalam masa transisi. Ketiga, kendala teknis sistem aplikasi seperti ketidakstabilan pada aplikasi strategis SAKTI, Srikandi, dan SINERGI menghambat kelancaran operasional dan memaksa penggunaan metode manual yang memakan waktu serta berpotensi menimbulkan kesalahan input data. Keempat, kompleksitas koordinasi lintas sektor tercermin dari sulitnya menjadwalkan konsultasi dengan instansi eksternal karena padatnya agenda pimpinan, yang berakibat pada keterlambatan pengesahan dokumen penting seperti Perjanjian Kinerja dan Renstra. Kelima, keterbatasan SDM dengan keahlian spesifik tertentu, seperti pengembang aplikasi, desainer publikasi, dan analis data tingkat lanjut, menghambat

percepatan pengembangan sistem dan produksi materi diseminasi yang inovatif. Meskipun demikian, dengan strategi mitigasi yang tepat dan koordinasi intensif, Biro Perencanaan berhasil mengatasi berbagai hambatan tersebut dan tetap mencapai kinerja yang sangat optimal.

3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi periode yang penuh dinamika bagi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyediakan data statistik berkualitas, BPS diamanatkan untuk berkontribusi aktif dalam berbagai prioritas yang ditetapkan pemerintah, mulai dari dukungan terhadap pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, pelaksanaan Instruksi Presiden, hingga penyiapan berbagai isu strategis nasional yang menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan.

Biro Perencanaan memegang peran yang bersifat *enabling* atau memfasilitasi terhadap seluruh pencapaian prioritas tersebut. Meskipun tidak secara langsung turun ke lapangan melaksanakan kegiatan teknis statistik, kontribusi Biro Perencanaan sangatlah krusial. Peran ini diwujudkan melalui serangkaian fungsi strategis, antara lain: memastikan ketersediaan dan optimalisasi anggaran bagi kegiatan prioritas, menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan arah kebijakan nasional, melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan, serta membangun koordinasi lintas unit dan lintas instansi guna menyalurkan perencanaan dan penganggaran.

Pada tahun 2025, dukungan Biro Perencanaan difokuskan pada tiga kelompok besar prioritas. Pertama, Prioritas Nasional yang mencakup penyediaan data untuk mendukung 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan, serta Pembinaan Statistik Sektoral dalam rangka penguatan Sistem Statistik Nasional. Kedua, Prioritas Presiden yang meliputi implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara, Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan Gabah/Beras melalui Survei KSA dan Ubinan Padi, serta Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Ketiga, Isu Strategis Nasional yang menjadi perhatian khusus, yaitu persiapan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) serta penyusunan Neraca Arus Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bersama dengan Neraca Komoditas Pangan.

Subbab ini akan menguraikan secara komprehensif output-output strategis yang telah dihasilkan Biro Perencanaan dalam mendukung masing-masing prioritas tersebut. Selain itu, akan dipaparkan pula berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, baik yang bersifat

regulasi, anggaran, maupun teknis sistem, beserta solusi yang telah diterapkan. Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, dirumuskan pula rencana tindak lanjut untuk memastikan efektivitas dukungan Biro Perencanaan terhadap pencapaian target pembangunan nasional di masa mendatang.

1. Output yang sudah dihasilkan pada setiap prioritas dan isu strategis nasional, yaitu: Prioritas Nasional
 - a. Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan
 - Tersedianya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPS 2025-2029 yang telah mengakomodir dan menyelaraskan indikator-indikator tujuan pembangunan jangka panjang tersebut ke dalam tujuan, sasaran, dan program kerja BPS.
 - Tersusunnya alokasi anggaran tahun 2025 dan pra-rancangan anggaran 2026 yang memprioritaskan kegiatan-kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang menjadi sumber indikator utama tersebut.
 - Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) triwulanan dan semesteran yang memantau progres ketercapaian target kegiatan pendukung indikator prioritas.
 - b. Pembinaan Statistik Sektoral
 - Tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di pusat dan daerah.
 - Tersusunnya laporan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang menjadi bahan rekomendasi perbaikan koordinasi antar K/L/D/I.
2. Prioritas Presiden
 - a. Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja Negara
 - Dokumen Revisi DIPA BPS Tahun 2025 yang telah disesuaikan dan menyusut sebesar Rp 4,25 miliar sebagai implementasi instruksi presiden, termasuk alokasi ulang yang tetap melindungi kegiatan prioritas.
 - Laporan realisasi dan efisiensi anggaran yang menunjukkan penajaman belanja pada program-program strategis.
 - b. Inpres 6/2025 tentang Pengadaan Gabah/Beras (Survei KSA & Ubinan Padi)
 - Pengesahan DIPA dan petunjuk pelaksanaan anggaran yang memastikan dana tersedia tepat waktu untuk pelaksanaan survei KSA dan Ubinan Padi secara nasional.
 - Pemantauan penyerapan anggaran kegiatan survei tersebut untuk menghindari keterlambatan di lapangan.
 - c. Inpres 8/2025 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

- Sinkronisasi anggaran untuk kegiatan pendataan dan survei pendukung penghitungan kemiskinan (seperti Susenas Modul Ketahanan Sosial).
 - Analisis Monev terhadap kegiatan-kegiatan BPS yang kontributif terhadap pemantauan indikator kemiskinan.
3. Isu Strategis Nasional
- a. Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026)
- Pagu indikatif dan pra-rancangan anggaran monumental untuk SE 2026 yang telah disiapkan sejak tahun 2025.
 - Dokumen Masterplan dan Rencana Kerja SE 2026 yang telah melalui proses perencanaan dan pembahasan anggaran.
 - Koordinasi dengan DJA dan Bappenas untuk memastikan kebutuhan pendanaan yang besar dapat diakomodir dalam pagu nasional.
- b. Penyusunan Neraca Arus Energi & Emisi GRK, serta Neraca Komoditas Pangan
- Alokasi anggaran dan penempatan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (DIPA) untuk mendukung kegiatan kompilasi dan integrasi data administratif dari berbagai K/L.
 - Proses pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan analisis dan pengolahan data yang didukung oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).

KENDALA UMUM YANG DIHADAPI:

1. Kendala Regulasi dan Kelembagaan: Belum finalnya struktur organisasi (SOTK) baru BPS dan beberapa peraturan badan (Perban) turunan menghambat kecepatan dalam menyusun rencana kerja dan penganggaran yang definitif.
2. Kendala Anggaran: Kebijakan efisiensi belanja (*budget cut*) yang signifikan dan mendadak menuntut penyesuaian ulang seluruh rencana kegiatan dengan prioritas yang sangat ketat.
3. Kendala Sistem dan Koordinasi: Aplikasi perencanaan dan keuangan (SAKTI, SIRUP) yang masih mengalami kendala teknis serta koordinasi dengan mitra kerja eksternal (DJA, Bappenas, K/L) yang memerlukan waktu karena dinamika kebijakan mereka.

SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN:

1. Untuk Kendala Regulasi: Melakukan koordinasi intensif dengan Biro Hukum dan Sekretariat Utama untuk mempercepat proses hukum, sementara secara paralel

menyusun dokumen perencanaan dengan menggunakan asumsi terbaik berdasarkan draft yang ada.

2. Untuk Kendala Anggaran: Menyusun skenario prioritas kegiatan secara ketat untuk program prioritas nasional/presiden. Melakukan negosiasi dan sosialisasi intensif dengan DJA dan Bappenas untuk melindungi anggaran kegiatan inti.
3. Untuk Kendala Sistem & Koordinasi: Menggunakan mekanisme kerja manual/offline sebagai cadangan, memperkuat komunikasi melalui forum formal (rapat koordinasi) dan informal, serta menunjuk PIC khusus untuk menjaga komunikasi dengan mitra eksternal.

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PER PRIORITAS:

1. Prioritas Nasional (Data Visi Indonesia Emas & Pembinaan Statistik Sektoral):
 - a. Mempercepat finalisasi metadata Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS yang terhubung dengan indikator RPJPN, untuk memastikan pengukuran kinerja yang tepat.
 - b. Mengintegrasikan hasil evaluasi statistik sektoral ke dalam sistem perencanaan tahun berikutnya, agar anggaran pembinaan lebih tepat sasaran.
2. Prioritas Presiden (Semua Inpres):
 - a. Menyusun skema penganggaran multi-tahun (multi-year budgeting) atau pola block grant untuk program prioritas berkelanjutan (seperti pengentasan kemiskinan), agar perencanaan lebih stabil dan tidak terganggu budget cut tahunan.
 - b. Membuat dashboard monitoring khusus untuk kegiatan yang mendukung Inpres, sehingga pimpinan dapat memantau realisasi anggaran dan output secara real-time.
3. Isu Strategis Nasional (Sensus Ekonomi 2026 dan Neraca):
 - a. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa teknologi informasi (TI) dan infrastruktur pendukung SE 2026, mengingat siklus pengadaan yang panjang.
 - b. Memfasilitasi perjanjian kerja sama (PKS) dan kerangka acuan kerja (KAK) yang lebih fleksibel dengan K/L sumber data, untuk memperlancar proses kompilasi data neraca.

3.4 Prestasi dan Inovasi Unit Kerja/Satuan Kerja

Pada tahun 2025, Biro Perencanaan berhasil meraih peringkat III Mandala Adhikarya Tingkat Pusat atas Prestasi Unggul dalam Transformasi Digital, yang diserahkan bertepatan dengan peringatan Hari Statistik Nasional. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Badan Pusat Statistik kepada unit atau satuan kerja terbaik yang menunjukkan kinerja unggul dalam penerapan transformasi digital. Pencapaian tersebut menjadi pengakuan atas komitmen dan kontribusi nyata Biro Perencanaan dalam memperkuat layanan statistik berbasis teknologi, mendorong peningkatan efisiensi birokrasi, serta menghadirkan layanan publik yang semakin adaptif dan responsif terhadap dinamika serta perkembangan zaman.

Biro Perencanaan juga melakukan inovasi dalam rangka mendukung tercapainya kinerja selama tahun 2025, antara lain:

1. Pengembangan SINERGI

SINERGI (Sistem Informasi Kinerja Organisasi) adalah aplikasi berbasis web untuk mendukung penyelenggaraan akuntabilitas kinerja organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik meliputi perencanaan, pengukuran, monitoring, serta evaluasi kinerja yang mengintegrasikan aplikasi kinerja Pegawai (KipApp), Kinerja Penganggaran (SAKTI), dan evaluasi AKIP oleh APIP Internal, Penilaian perilaku kinerja bulanan dengan 360. Pengembangan SINERGI dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian PANRB dalam Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPS, khususnya terkait kebutuhan integrasi sistem pengukuran kinerja organisasi dan kinerja individu pegawai.

2. Pengembangan iPLAN

Aplikasi iPLAN merupakan pilar utama dalam digitalisasi perencanaan di Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2025, telah dilakukan pengembangan meliputi peningkatan efisiensi proses kompilasi anggaran, penyajian data usulan yang sesuai dengan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), serta mempermudah penyusunan dokumen perencanaan seperti Renja dan RKA-K/L.

3. Pengembangan Masterplan

Aplikasi Masterplan sebuah aplikasi berbasis *web* yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghimpun, mengelola, dan mengevaluasi usulan kebutuhan sarana & prasarana serta belanja operasional dari seluruh satuan kerja BPS di tingkat pusat dan daerah. Pengembangan yang dilakukan pada tahun 2025 yaitu menambah menu dan sub-menu terkait *rate transport*, *dashboard*, perhitungan belanja pegawai, dll.

4. Manajemen Mitra

Manajemen Mitra adalah salah satu aplikasi internal BPS yang digunakan untuk mengelola seluruh siklus pengelolaan Mitra Statistik. Aplikasi ini mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi keterlibatan mitra dalam kegiatan statistik BPS, baik di pusat maupun daerah. Pengguna dari aplikasi ini adalah pegawai BPS. Sedangkan mitra BPS menggunakan aplikasi SOBAT sebagai front-end interaksi antara mitra dan BPS. Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran data, dan akses informasi penugasan.

3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Total realisasi Biro Perencanaan sepanjang tahun 2025 mencapai Rp3,097 miliar. Dengan demikian, persentase realisasi terhadap pagu akhir tanpa blokir mencapai 72,87 persen. Adapun realisasi terbesar terjadi pada sasaran "Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak" dengan nilai realisasi sebesar Rp1,705 miliar, disusul oleh sasaran "Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran Didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko" dengan nilai realisasi sebesar Rp1,392 miliar.

Tabel 14. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Sasaran Kegiatan/ Rincian Output	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	Pagu yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sasaran 1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak	100	2.671.152.000	1.705.152.419	63,84	1,5664
961-Layanan Reformasi Kinerja		2.671.152.000	1.705.152.419	63,84	
Sasaran 2. Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran Didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko	99,97	1.579.641.000	1.392.438.589	88,15	1,1341
2A5-Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I		145.246.000	129.983.595	89,49	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1.369.905.000	1.201.361.342	87,70	

Sasaran Kegiatan/ Rincian Output	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	Pagu yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi		64.490.000	61.093.652	94,73	
Total	99,98	4.250.793.000	3.097.591.008	72,87	1,3720

*) Dihitung dari Capaian terhadap target 2025 (%)/Persentase realisasi anggaran 2025 (%)

Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan efisiensi menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian kinerja organisasi. Oleh karena itu tingkat efisiensi anggaran digunakan sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur efektivitas pemanfaatan anggaran dalam mencapai sasaran strategis. Tingkat efisiensi anggaran dapat dihitung dengan membandingkan capaian kinerja terhadap persentase realisasi anggaran. Kriteria yang digunakan dalam pengukuran tingkat efisiensi adalah:

1. Jika tingkat efisiensi lebih besar atau sama dengan satu maka terjadi efisiensi;
2. Jika tingkat efisiensi kurang dari satu maka efisiensi tidak tercapai,

Berdasarkan cara hitung tersebut diperoleh tingkat efisiensi anggaran di Biro Perencanaan sebesar 1,3720 yang artinya penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja telah dilakukan secara efisien. Jika ditinjau menurut sasaran strategis Biro Perencanaan terlihat bahwa sasaran "Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak" memiliki tingkat efisiensi terbesar yaitu 1,5664 persen yang kemudian disusul oleh sasaran "Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran Didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko" dengan tingkat efisiensi sebesar 1,1341.

Tim 14 Reformasi Birokrasi

1. Pelaksanaan RB
2. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas

Tim 11 SAKIP

Perjanjian Kinerja BPS: Januari s.d. Desember
Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja (SAKIP) PS P
Triwulanan
Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja (SAKIP) PS P
Triwulanan

Tim

Ren
Per
Per
an: C
(UP)
(n-1)
ber

Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan: Fe
Idaya Organisasi: Febru
Basis Core Value BerAKH
Pegunaan Agen Perubah

BIRO PERENCANAAN

BAB 4.

PENUTUP

BAB 4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Biro Perencanaan merupakan unit kerja eselon II yang memiliki peran krusial dan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di BPS, sesuai dengan sasaran strategis ketiga dalam Renstra BPS 2025-2029. Biro ini ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas (97% berpendidikan minimal S1, 91% memiliki keahlian fungsional) dan mendapatkan dukungan anggaran yang memadai, meskipun terkena dampak kebijakan efisiensi belanja negara.

Kinerja Biro Perencanaan secara langsung berkontribusi pada pencapaian Sasaran Strategis 3 BPS, yaitu mewujudkan tata kelola internal yang bersih, akuntabel, dan profesional, yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Secara tidak langsung, biro ini berperan sebagai "enabler" atau pendukung vital bagi seluruh program prioritas nasional dan presiden yang dilaksanakan BPS (seperti sensus dan survei strategis) melalui fungsi perencanaan anggaran, monitoring, dan evaluasi yang menjadi tugas pokoknya.

Pada tahun 2025, Biro Perencanaan berhasil mencapai kinerja yang sangat memuaskan dengan predikat "Baik" (Nilai Kinerja Organisasi 89,98%). Capaian ini lebih tinggi dari rata-rata unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Utama, membuktikan efektivitas manajemen dan akuntabilitas yang unggul.

Pencapaian kinerja tinggi ini diraih di tengah berbagai tantangan signifikan, seperti pemotongan anggaran drastis (Rp 4,25 Miliar), kendala regulasi, dan hambatan teknis operasional. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Biro Perencanaan memiliki kemampuan adaptasi, mitigasi risiko, dan pemecahan masalah yang sangat baik. Strategi kunci yang diterapkan, seperti koordinasi intensif lintas unit, percepatan proses manual, dan optimalisasi tim, terbukti efektif.

Capaian tahun 2025 Biro Perencanaan tidak hanya memenuhi target jangka pendek, tetapi juga telah mencapai atau mendekati target akhir Renstra 2029. Hal ini menunjukkan fondasi yang kuat, konsistensi kinerja, dan kesiapan Biro Perencanaan untuk menjaga performa tinggi dalam jangka panjang, sekaligus berkontribusi berkelanjutan bagi penguatan kelembagaan BPS.

Secara keseluruhan, Biro Perencanaan adalah unit kerja dengan sumber daya yang mumpuni, fokus pada tata kelola internal, dan telah membuktikan kontribusi yang signifikan

dalam mendukung akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi BPS sebagai lembaga statistik nasional yang independen dan terpercaya.

4.2 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Berdasarkan analisis capaian kinerja dan identifikasi kendala pada Tahun 2025, berikut adalah rekomendasi perbaikan kinerja untuk periode mendatang:

1. Penguatan Integrasi dan Sinkronisasi Sistem Perencanaan & Penganggaran:
 - Rekomendasi: Mempercepat integrasi sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja (seperti SINERGI, SAKTI) ke dalam satu platform terpadu atau interface yang saling terhubung.
 - Tindak Lanjut: Koordinasi intensif dengan Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) dan Biro Keuangan untuk finalisasi pengembangan aplikasi terintegrasi, menyelaraskan metadata, dan menyusun SOP pemutakhiran data yang seragam.
2. Optimalisasi Tata Kelola Mitra dan Petugas Lapangan Berbasis Digital:
 - Rekomendasi: Menyelesaikan dan mengimplementasikan tata kelola Mitra Statistik beserta regulasinya yang dilengkapi dengan sistem digital untuk monitoring beban kerja, penugasan, dan pembayaran honorarium.
 - Tindak Lanjut: Percepatan harmonisasi dan penetapan Perban Tata Kelola Mitra, pengembangan aplikasi Manajemen Mitra dan Sobat, serta sosialisasi menyeluruh kepada seluruh unit kerja pengguna.
3. Peningkatan Kualitas Monitoring & Evaluasi (Monev) dari Output ke Outcome:
 - Rekomendasi: Mengalihkan fokus monev tidak hanya pada capaian administratif-output, tetapi lebih pada analisis outcome dan dampak program/kegiatan.
 - Tindak Lanjut: Penyusunan panduan monev berbasis outcome, pelatihan bagi SDM Biro Perencanaan dan PIC unit kerja tentang teknik evaluasi dampak, serta pengembangan template laporan yang menyoroti temuan substantif dan rekomendasi perbaikan kebijakan.
4. Pengembangan Kapasitas SDM pada Area Strategis dan Teknologi Mutakhir:
 - Rekomendasi: Meningkatkan kompetensi SDM Biro Perencanaan dalam hal analisis data (data analytics), teknologi prediktif, kecerdasan artifisial (AI) untuk perencanaan, serta pemahaman mendalam tentang substansi kegiatan statistik utama BPS (seperti sensus/survei).

- Tindak Lanjut: Menyelenggarakan pelatihan khusus, kursus singkat, atau pembentukan kelompok belajar (knowledge sharing session) internal yang membahas metodologi statistik, tools analitik, dan best practices dalam perencanaan strategis berbasis data.
5. Percepatan Finalisasi Payung Hukum dan Dokumen Strategis:
- Rekomendasi: Membuat timeline dan pemantauan yang ketat untuk percepatan finalisasi seluruh dokumen hukum dan strategis yang menjadi prasyarat kerja, seperti SOTK baru, Perban-Perban turunan, Renstra BPS, dan metadata IKU.
 - Tindak Lanjut: Penetapan PIC yang jelas, rapat koordinasi rutin dengan tim hukum BPS dan unit kerja terkait, serta pemanfaatan project management tools untuk memantau progres penyelesaian setiap dokumen.
6. Penyempurnaan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern (SPIP):
- Rekomendasi: Melakukan pemutakhiran dan pendalaman analisis risiko secara berkala, khususnya risiko yang muncul dari perubahan kebijakan eksternal (seperti efisiensi anggaran) dan ketergantungan pada sistem TI.
 - Tindak Lanjut: Reviu dan perbarui dokumen Risk Register Biro Perencanaan, integrasi rencana mitigasi risiko ke dalam rencana kerja, serta peningkatan sosialisasi budaya pengendalian intern kepada seluruh pegawai.
7. Penguatan Diseminasi dan Komunikasi Internal:
- Rekomendasi: Meningkatkan efektivitas komunikasi hasil perencanaan, monev, dan capaian reformasi birokrasi kepada seluruh jajaran BPS.
 - Tindak Lanjut: Mengoptimalkan kanal komunikasi internal (seperti portal intranet, newsletter), menyelenggarakan forum sosialisasi regulasi baru secara rutin, serta memproduksi materi komunikasi (infografis, video ringkas) yang informatif dan mudah dipahami.



Tim 14 Reformasi Birokrasi

1. Pelaksanaan RB
2. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas

TI SAKIP

Perjanjian Kinerja BPS: Januari s.d. Desember
 perencanaan monitoring, dan evaluasi Kinerja (SAK) PS Pu
 perencanaan monitoring dan evaluasi Kinerja (SAK) PS Pu
 BPS D... wulan...
 Laporan...
 5. Laporan...
 6. Laporan...
 7. Pe... gan... anu... mber

Triwulanan

Tim 14
Kele

Tim

Ren Per... (UP) ber... (n-1) ber...

Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan: Fe...
 Adanya Organisasi; Februari...
 sasi Core Value BerAKH...
 ngunan Agen Perubahan

BIRO PEREN...

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO PERENCANAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. M. Nashrul Wajdi, SST., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
NIP. 19720609199412 1 001

Palembang, 24 Januari 2025

Pihak Pertama

Dr. M. Nashrul Wajdi, SST., M.Si
NIP. 19791213200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERENCANAAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak	Persentase Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Tepat Waktu	100,00 Persen
2.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran Didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko	Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) BPS	Sangat Baik
3.		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,70 Poin
4.		Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada NKA	Sangat Baik

	Program/Kegiatan		Anggaran
1)	2881 Penyusunan Pengembangan dan Evaluasi Program dan Anggaran	Rp.	7.690.761.000
	Jumlah	Rp.	7.690.761.000

Plt. Sekretaris Utama



Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
NIP. 19720609199412 1 001

Palembang, 24 Januari 2025
Kepala Biro Perencanaan



Dr. M. Nashrul Wajdi, SST., M.Si
NIP. 19791213200012 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERENCANAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. M. Nashrul Wajdi, SST., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Moh Edy Mahmud, S.Si, M.P
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Moh Edy Mahmud, S.Si, M.P
NIP. 19690215199112 1 001

Jakarta, 03 Maret 2025
Pihak Pertama


Dr. M. Nashrul Wajdi, SST., M.Si
NIP. 19791213200012 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERENCANAAN**


No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak	Persentase Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Tepat Waktu	100,00 Persen
2.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran Didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko	Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) BPS	Sangat Baik
3.		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,70 Poin
4.		Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada NKA	Sangat Baik

	Program/Kegiatan		Anggaran
1)	2881 Penyusunan Pengembangan dan Evaluasi Program dan Anggaran	Rp.	7.690.761.000
	Jumlah	Rp.	7.690.761.000

Dit. Sekretaris Utama


Moh Edy Mahmud, S.Si, M.P
 NIP. 19690315199112 1 001

Jakarta, 03 Maret 2025
Kepala Biro Perencanaan


Dr. M. Nashrul Wajdi, SST., M.Si
 NIP. 19791213200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERENCANAAN


No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak	Persentase Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Tepat Waktu	100,00 Persen
2.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran Didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko	Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) BPS	Sangat Baik
3.		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,70 Poin
4.		Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada NKA	Sangat Baik

	Program/Kegiatan		Anggaran
1)	2881 Penyusunan Pengembangan dan Evaluasi Program dan Anggaran	Rp.	2.791.847.000
Jumlah		Rp.	2.791.847.000

Plt. Sekretaris Utama


Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
NIP. 19710815199312 2 002

Jakarta, 23 Oktober 2025
Kepala Biro Perencanaan


Dr. M. Nashrul Wajdi, SST., M.Si
NIP. 19791213200012 1 002

Lampiran 2. Jumlah Pegawai Biro Perencanaan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Satuan Kerja	Pendidikan				Jumlah
	S3	S2	S1	DIII ke bawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Biro Perencanaan	2	24	36	2	64

Lampiran 3. Jumlah Pegawai Biro Perencanaan Menurut Golongan Tahun 2025

Satuan Kerja	Pendidikan				Jumlah
	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Biro Perencanaan	11	52	1	-	64

Lampiran 4. Jumlah Pejabat Fungsional Biro Perencanaan Tahun 2025

Satuan Kerja	Fungsional					Jumlah
	Utama	Madya	Muda	Pertama	Terampil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Biro Perencanaan	-	9	19	30	2	60

Lampiran 5. Laporan Hasil Evaluasi SPIP BPS Tahun 2024



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
PENILAIAN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
PADA BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2024**

**Nomor : PE.09.03/LHP-213/D101/1/2024
Tanggal : 31 Desember 2024**

H. Hasil Evaluasi

1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Informasi umum terkait penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada BPS sebagai berikut:

a. Nama K/L	:	Badan Pusat Statistik
b. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik	:	429 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepka BPS Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 3 Juli 2024
c. Tanggal mulai dan selesai	:	10 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024
d. Nomor dan Tanggal Surat Tugas Penjaminan Kualitas	:	B-244/08300/PW.100/2024 tanggal 23 Agustus 2024
e. Tanggal mulai dan selesai	:	28 Agustus 2024 s.d. 25 September 2024
f. Periode waktu penilaian	:	01 Juli 2023 s.d. 30 Juni 2024
g. Nomor dan tanggal Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM)	:	R-827/02000/PR.110/2024 tanggal 15 Oktober 2024

Tim Penilai Mandiri yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 429 Tahun 2024 tanggal 3 Juli 2024 melakukan penilaian mandiri atas tingkat maturitas SPIP pada satuan kerja masing-masing dan melaporkan hasil penilaian kepada Kepala BPS.

2. Kesesuaian Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada BPS tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

No.	Fokus Penilaian	Nilai			
		Penilaian Mandiri	Quality Assurance	Evaluasi	Naik/Turun
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,489	4,424	3,697	Turun
2.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,150	3,869	3,303	Turun
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	4,178	4,178	3,400	Turun
4.	Level Kapabilitas APIP*	3,000	3,000	3,000	Tetap

*Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Utama BPS Tahun 2024 Nomor PE.09.03/S-531/D1/01/2024 tanggal 30 Oktober 2024

Uraian penjelasan hasil penilaian mandiri sebagai berikut:

- a. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **3,697** atau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi).

1. mengidentifikasi kembali *Area of Improvement (Aoi)* sesuai hasil evaluasi kami untuk selanjutnya menyusun rencana tindak pengendalian untuk masing-masing unsur/subunsur pada komponen Struktur dan Proses.
2. melakukan reviu terhadap rencana awal sasaran strategis BPS tahun 2025-2029 agar sasaran strategis; indikator kinerja sasaran strategis, dan target kinerja mendukung pencapaian tujuan organisasi BPS.
3. mengupayakan percepatan pengesahan regulasi yang mengatur penerapan proses bisnis BPS dan penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BPS.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Raden Murwantara

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
2. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
3. Inspektur Utama Badan Pusat Statistik

Lampiran 6. NKA BPS Tahun 2025

The screenshot displays the 'MONEV' application interface for 'BADAN PUSAT STATISTIK'. The main heading is 'Nilai Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga'. The interface includes a search bar, a 'Download Excel' button, and a table with the following data:

No.	Kode Kementerian/Lembaga	Kementerian Lembaga	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	094	BADAN PUSAT STATISTIK	98,90	96,19	97,55

Additional interface elements include a 'Tampilkan 25 entri' dropdown, a 'Cari:' search input, and pagination controls showing 'Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri' with 'Sebelumnya' and 'Selanjutnya' buttons. The footer contains copyright information for 'DSP DJA KEMENKEU' and the application version 'Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2026-01-21 14:00:29'. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 21/01/2026 and the time as 14:00.

**Lampiran 7 Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)
BPS Tahun 2025**



**Kementerian PPN/
Bappenas**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL PEMBAHASAN PENILAIAN INDEKS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN)
KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2025**

JAKARTA

2025

**LEMBAR BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL PEMBAHASAN PENILAIAN INDEKS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN) KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN 2025**

Nama Instansi : Badan Pusat Statistik
 Unit Kerja Mitra K/L : Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan
 Kementerian PPN/Bappenas Model Pembangunan
 Total Nilai : 93,90
 Nilai Maksimum : 100,00
 Total Nilai Penyesuaian : 93,90
 Predikat : Sangat Baik

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarasan Terbobot (Pembulatan)
1 Integrasi	1.a Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	1.a.1 Muatan dalam Renstra K/L Sesuai dengan Muatan (sasaran, target, satuan target) di dalam RPJMN	29	28,60
	1.b Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L	1.b.1 Muatan (Sasaran (strategis, program, kegiatan), RO, target dan satuan target) dalam Renja K/L Konsisten dengan Muatan di dalam Renstra K/L	13	7,58
		1.c Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	1.c.1 Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RKP	7
	1.c.2 Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RKP		7	7,00
	1.c.3 Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP		7	7,00
	1.c.4 Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP		7	7,00
	2 Sinkronisasi	2.a Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada Tahun Perencanaan	2.a.1 Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Perencanaan Sesuai dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	Tidak dilakukan penilaian pada IPPN 2025
2.b Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L		2.b.1 Total Pagu Anggaran dalam RKA K/L Sesuai dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L	10	10,00

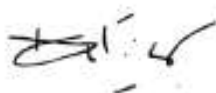
Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarasan Terbobot (Pembulatan)
	2.c Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada Tahun Pelaksanaan	2.c.1 Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Pelaksanaan Sesuai dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	10	9,72
3 Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	3.a Target dan Sasaran Nasional menjadi Target dan Sasaran Kinerja Instansi terkait	3.a.1.a Indikator Sasaran PN/PP/KP yang ditugaskan Menjadi IKU Instansi Terkait	10	10,00

CATATAN:

1. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan verifikasi atas bukti dukung untuk *sheet* 1.c.1 dan 1.c.3 terkait dengan target RO dalam DIPA Satker BPS.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Hasil Penilaian IPPN K/L Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PUSAT STATISTIK



Dwi Wulan Krisna

Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan



Sasmita Kartika Sari

**Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
KEMENTERIAN PPN/BAPENAS**



Dr. Ir. Ahmad Dading Gunadi, MA

Lampiran 8. Daftar Prestasi/Penghargaan Biro Perencanaan Tahun 2025



Peringkat III Mandala Adhikarya Tingkat Pusat atas Prestasi Unggul dalam Transformasi Digital

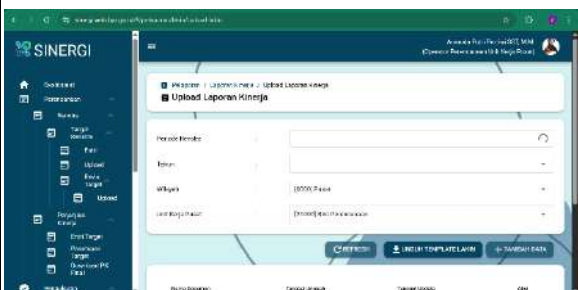
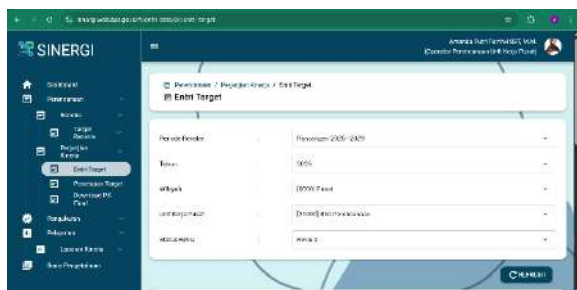
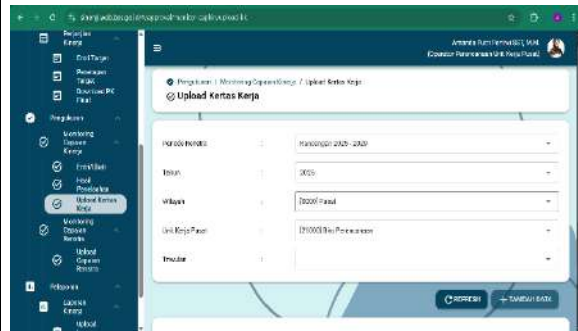


Terbaik III Hasil Audit Kearsipan Internal

Lampiran 9. Daftar Inovasi Biro Perencanaan Tahun 2025

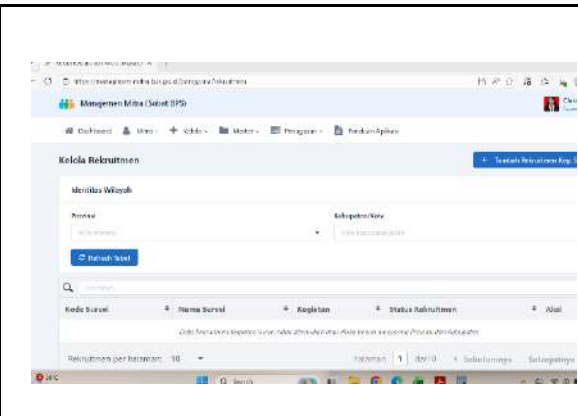
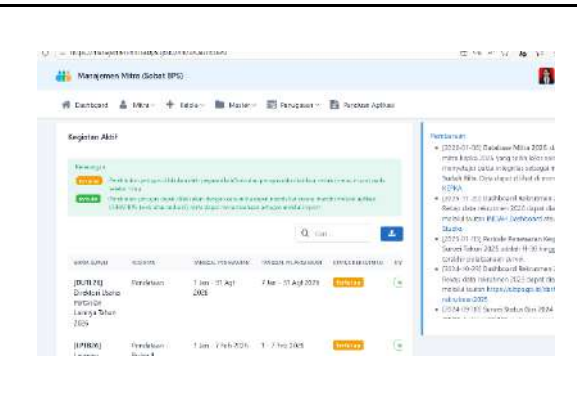
1. SINERGI

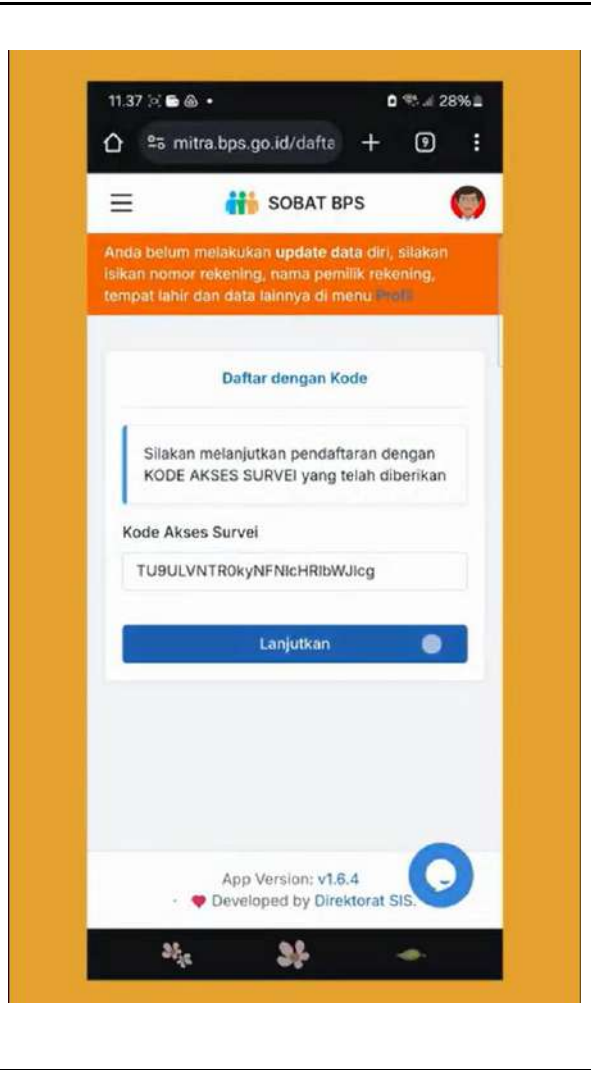
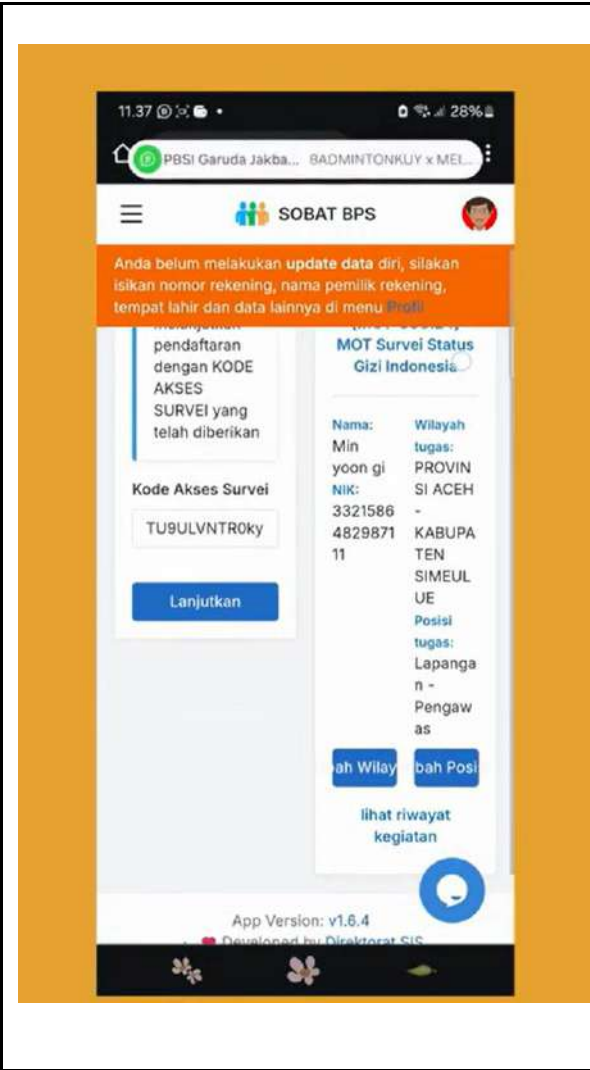
Aplikasi Sinergi merupakan platform terintegrasi untuk penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BPS.



2. MANAJEMEN MITRA

Salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan kegiatan sensus dan survei adalah rekrutmen mitra/petugas. Rekrutmen mitra/petugas harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan saksama agar diperoleh petugas yang bertanggung jawab, disiplin, ulet, dan teliti. Manajemen mitra hadir untuk mengakomodir kebutuhan tersebut.





**Lampiran 10. Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Biro Perencanaan
TA 2025**

Sasaran Kegiatan/ Rincian Output	Rata-Rata Capaian Kinerja	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi *)
Sasaran 1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak	100	2.671.152.000	1.705.152.419	63,84	1,5664
961-Layanan Reformasi Kinerja		2.671.152.000	1.705.152.419	63,84	
Sasaran 2. Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran Didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko	99,97	1.579.641.000	1.392.438.589	88,15	1,1341
2A5-Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I		145.246.000	129.983.595	89,49	
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1.369.905.000	1.201.361.342	87,70	
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi		64.490.000	61.093.652	94,73	
Total	99,98	4.250.793.000	3.097.591.008	72,87	1,3720

Sumber Data Keuangan: SAKTI (data sementara)

**Lampiran 11. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Diterbitkan
Biro Perencanaan Tahun 2025**

No	Nama Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Rencana Dokumen	Triwulan Rencana Rilis/Terbit	Jumlah Realisasi Dokumen	Triwulan Realisasi Rilis/Terbit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Tepat Waktu					
1	Dokumen Pedoman Change Management	1	I	1	I
2	Dokumen Penyusunan Renstra	2	II	2	II
3	Dokumen Reviu Standar Operasional Prosedur	136	III	140	III
4	Laporan Pelaksanaan Integrasi Statistik (EWS BCS)	1	IV	1	IV
5	Laporan Akses OECD & BRICS	2	IV	2	IV
6	Dokumen Penyusunan Tata Kelola Data Administrasi	1	IV	1	IV
7	Laporan Pelaksanaan Change Management	1	IV	1	IV
8	Dokumen Penyusunan Renstra	2	III	2	III
9	Laporan Pelaksanaan Penyusunan Indeks-Indeks di dalam RB yang tidak ada di IKU	1	IV	1	IV
10	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	1	IV	1	IV
11	Laporan Pendampingan Zona Integritas	1	IV	1	IV
12	Laporan Penyusunan Tata Kelola FWA BPS	1	IV	1	IV
13	Laporan Pelaksanaan Tugas Change Champion dan Change Ambassador	1	IV	1	IV
Dokumen/Laporan Perencanaan Bidang Teknis, Perencanaan Bidang Non Teknis, Konsolidasi Rencana dan Pelaksanaan Program, Standardisasi dan Regulasi, Pengembangan dan Manajemen TI, serta Manajemen Sumber Daya dan Inovasi					
14	Dokumen Masterplan dan Network Planning Sensus	1	IV	1	IV
15	Dokumen Rancangan Awal Program PPIS Triwulan I	15	I	15	I
16	Laporan Rancangan Awal Program PPIS Triwulan I	18	I	18	I
17	Dokumen Pagu Indikatif/Renja Program PPIS Triwulan II	15	II	16	II

No	Nama Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Rencana Dokumen	Triwulan Rencana Rilis/Terbit	Jumlah Realisasi Dokumen	Triwulan Realisasi Rilis/Terbit
18	Dokumen Pagu Indikatif/Renja Program PPIS Triwulan III	1	III	1	III
19	Laporan Pagu Indikatif/Renja Program PPIS Triwulan II	17	II	17	II
20	Dokumen Pagu Anggaran Program PPIS Triwulan III	1	III	1	III
21	Laporan Pagu Anggaran Program PPIS Triwulan III	1	III	1	III
22	Dokumen Usulan Inisiatif Baru BPS Triwulan I	9	I	9	I
23	Laporan Aplikasi IPLAN Triwulan IV	1	IV	1	IV
24	Dokumen Rancangan Awal Program DUKMAN Triwulan I	12	I	12	I
25	Laporan Rancangan Awal Program DUKMAN Triwulan I	11	I	11	I
26	Dokumen Pagu Indikatif/Renja Program DUKMAN Triwulan II	12	II	12	II
27	Laporan Pagu Indikatif/Renja Program DUKMAN Triwulan II	11	II	11	II
28	Dokumen Pagu Anggaran Program DUKMAN Triwulan III	1	III	1	III
29	Dokumen Proposal dan Pedoman PNBP Triwulan I	2	I	2	I
30	Laporan Pengelolaan Aplikasi Masterplan Triwulan IV	1	IV	1	IV
31	Laporan Penelaahan Inisiatif Baru yang belum pernah dilaksanakan dan Usulan Kegiatan Baru di Tahun Berjalan Triwulan IV	1	IV	1	IV
32	Laporan Data Informasi Kinerja Triwulan IV	1	IV	1	IV
33	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Indeks Perencanaan Pembangunan Triwulan IV	1	IV	1	IV
34	Laporan Sinkronisasi Jadwal Kegiatan Triwulan IV	1	IV	1	IV
35	Laporan Konsolidasi Rencana Triwulan IV	1	IV	1	IV
36	Laporan Pelaksanaan Rapat Pimpinan Triwulan IV	1	IV	1	IV

No	Nama Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Rencana Dokumen	Triwulan Rencana Rilis/Terbit	Jumlah Realisasi Dokumen	Triwulan Realisasi Rilis/Terbit
37	Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat dan Daerah Triwulan I	1	I	1	I
38	Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Pusat dan Daerah Triwulan IV	1	IV	1	IV
39	Dokumen Satuan Biaya Keluaran Khusus (SBKK) BPS Triwulan III	1	III	1	III
40	Dokumen Peraturan Kepala BPS Tentang Standar Biaya Kegiatan Statistik BPS Triwulan II	1	II	1	II
41	Dokumen Peraturan Kepala BPS Tentang Standar Biaya Kegiatan Statistik BPS Triwulan IV	1	IV	1	IV
42	Dokumen Rate Kegiatan Statistik N+2 Tahun Anggaran	1	IV	1	IV
43	Laporan Pelaksanaan Survei Harga Barang dan Jasa (SHBJ) dan Survei Standar Biaya (SSB)	1	IV	1	IV
44	Laporan Master Rate Transport terintegrasi Masterplan	1	IV	1	IV
45	Laporan Pelaksanaan Uji Kognitif Survei	1	IV	1	IV
46	Laporan Identifikasi Kebutuhan dan Pemeliharaan TI Biro Perencanaan	1	IV	1	IV
47	Laporan Pengembangan Aplikasi IPLAN	1	IV	1	IV
48	Laporan Penyusunan dan Pengembangan Aplikasi Masterplan	1	IV	1	IV
49	Laporan Pengembangan Aplikasi Perencanaan Lainnya	1	IV	1	IV
50	Laporan Pengembangan Aplikasi Sinergi	1	IV	1	IV
51	Laporan Pengembangan Aplikasi Back Office Selindo (BOS)	1	IV	1	IV
52	Laporan Pengelolaan SDM	1	IV	1	IV
53	Laporan Pengelolaan Rumah Tangga	1	IV	1	IV
54	Laporan Pengelolaan Tugas Belajar	1	IV	1	IV

No	Nama Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Rencana Dokumen	Triwulan Rencana Rilis/Terbit	Jumlah Realisasi Dokumen	Triwulan Realisasi Rilis/Terbit
55	Laporan Penyusunan Tata Kelola Mitra Statistik BPS	1	IV	1	IV
56	Laporan Pengelolaan Anggaran di Biro Perencanaan	1	IV	1	IV
57	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Kelembagaan	1	IV	1	IV
Dokumen/Laporan Monitoring Kinerja Lembaga, Akuntabilitas Kinerja, serta Pengendalian Internal dan Manajemen Resiko					
58	Laporan Monitoring Kegiatan dan Anggaran BPS Triwulan I	3	I	3	I
59	Laporan Monitoring Kegiatan dan Anggaran BPS Triwulan II	3	II	3	II
60	Laporan Monitoring Kegiatan dan Anggaran BPS Triwulan III	3	III	3	III
61	Laporan Monitoring Kegiatan dan Anggaran BPS Triwulan IV	3	IV	3	IV
62	Laporan Monitoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPS Triwulan I	1	I	1	I
63	Laporan Monitoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPS Triwulan II	1	II	1	II
64	Laporan Monitoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPS Triwulan III	1	III	1	III
65	Laporan Monitoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPS Triwulan IV	1	IV	1	IV
66	Publikasi Aktivitas BPS	1	III	1	IV
67	Laporan Nota Keuangan	1	III	1	III
68	Dokumen Assessment RO BPS pada Aplikasi SMART	1	I	1	I
69	Dokumen Capaian Output Triwulan I	3	I	3	I
70	Dokumen Capaian Output Triwulan II	3	II	3	II
71	Dokumen Capaian Output Triwulan III	3	III	3	III
72	Dokumen Capaian Output Triwulan IV	3	IV	3	IV
73	Dokumen Pelaporan e-Monev Bappenas Triwulan I	1	I	1	I

No	Nama Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Rencana Dokumen	Triwulan Rencana Rilis/Terbit	Jumlah Realisasi Dokumen	Triwulan Realisasi Rilis/Terbit
74	Dokumen Pelaporan e-Monev Bappenas Triwulan II	1	II	1	II
75	Dokumen Pelaporan e-Monev Bappenas Triwulan III	1	III	1	III
76	Dokumen Pelaporan e-Monev Bappenas Triwulan IV	1	IV	1	IV
77	Laporan e-Monev SBSN	1	IV	1	IV
78	Dokumen Pelaksanaan Hibah Triwulan I	1	I	1	I
79	Dokumen Pelaksanaan Hibah Triwulan II	1	II	1	II
80	Dokumen Pelaksanaan Hibah Triwulan III	1	III	1	III
81	Dokumen Pelaksanaan Hibah Triwulan IV	1	IV	1	IV
82	Laporan RAN P4GN Triwulan I	1	I	1	I
83	Laporan RAN P4GN Triwulan III	1	III	0	III
84	Dokumen Capaian Rencana Aksi PBWN-KP Triwulan I	1	I	1	I
85	Dokumen Capaian Rencana Aksi PBWN-KP Triwulan II	1	II	1	II
86	Dokumen Capaian Rencana Aksi PBWN-KP Triwulan III	1	III	1	III
87	Dokumen Capaian Rencana Aksi PBWN-KP Triwulan IV	1	IV	1	IV
88	Laporan Pelaksanaan Musrenbangda/Kemendagri lainnya	1	IV	1	IV
89	Dokumen Regulasi terkait SPIP dan Manajemen Risiko	2	IV	2	IV
90	Laporan Pembinaan SPIP dan Manajemen Risiko	1	IV	1	IV
91	Laporan Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP	1	IV	1	IV
92	Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko	1	IV	1	IV
93	Laporan Pemenuhan Permintaan Dokumen, Data, dan Informasi dari BPK dan Instansi Pengawasan Lainnya	1	IV	1	IV
94	Laporan Kinerja Lembaga Tahun 2024	1	I	1	I

No	Nama Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Rencana Dokumen	Triwulan Rencana Rilis/Terbit	Jumlah Realisasi Dokumen	Triwulan Realisasi Rilis/Terbit
95	Laporan Kinerja Lembaga Triwulan I Tahun 2025	1	III	1	III
96	Laporan Kinerja Lembaga Triwulan II Tahun 2025	1	III	1	III
97	Laporan Kinerja Lembaga Triwulan III Tahun 2025	1	IV	1	IV
98	Dokumen Perjanjian Kinerja (Awal)	67	I	67	I
99	Dokumen Perjanjian Kinerja (Penyesuaian dan Reviu)	67	II	67	II
100	Laporan Kinerja Sestama 2024	1	I	1	I
101	Laporan FRA Sestama Triwulan IV Tahun 2024	1	I	1	I
102	Laporan FRA Sestama Triwulan I Tahun 2025	1	III	1	III
103	Laporan FRA Sestama Triwulan II Tahun 2025	1	III	1	III
104	Laporan FRA Sestama Triwulan III Tahun 2025	1	IV	1	IV
105	Laporan Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Kerja Pusat Triwulan I 2025	1	III	1	III
106	Laporan Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Kerja Pusat Triwulan II 2025	1	III	1	III
107	Laporan Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Kerja Pusat Triwulan III 2025	1	IV	1	IV
108	Laporan Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Kerja Daerah Triwulan I 2025	1	III	1	III
109	Laporan Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Kerja Daerah Triwulan II 2025	1	III	1	III
110	Laporan Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Kerja Daerah Triwulan III 2025	1	IV	1	IV
111	Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi PANRB dan Evaluasi SAKIP	1	IV	1	IV
112	Laporan Pembinaan SAKIP	1	I	1	I
113	Laporan Internalisasi Pengisian Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Triwulanan	1	II	1	II

No	Nama Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Rencana Dokumen	Triwulan Rencana Rilis/Terbit	Jumlah Realisasi Dokumen	Triwulan Realisasi Rilis/Terbit
114	Laporan Kinerja Biro Perencanaan 2024	1	I	1	I
115	Laporan FRA Biro Perencanaan Triwulan IV Tahun 2024	1	I	1	I
116	Laporan FRA Biro Perencanaan Triwulan I Tahun 2025	1	III	1	III
117	Laporan FRA Biro Perencanaan Triwulan II Tahun 2025	1	III	1	III
118	Laporan FRA Biro Perencanaan Triwulan III Tahun 2025	1	IV	1	IV
Dokumen/Laporan Pelaksanaan Program dan Dukungan Pimpinan					
119	Dokumen Pagu Alokasi	1	IV	1	IV
120	Dokumen DIPA Induk dan DIPA Petikan	529	IV	540	IV
121	Laporan Layanan Revisi Anggaran	1	IV	1	IV
122	Dokumen Matriks Tim Pelaksana Kegiatan	1	IV	1	IV
123	Laporan Layanan Anggaran yang bersumber dari PNB dan Hibah	1	IV	1	IV
124	Laporan Layanan revisi anggaran satker sekretariat utama BPS	1	IV	1	IV
125	Laporan Pelaksanaan Tugas Staf Pengelola Keuangan yang membantu KPA	1	IV	1	IV
126	Laporan Penyusunan Materi dan Operator Paparan Pimpinan	1	IV	1	IV
127	Laporan Pendampingan Pimpinan dan Notulen Rapat	1	IV	1	IV
128	Laporan Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	1	IV	1	IV
129	Laporan Pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)	1	IV	1	IV
130	Laporan Highlight Mingguan Biro Perencanaan	1	IV	1	IV
131	Laporan Desain Konten Media Publikasi	1	IV	1	IV

